

Sedikit Pendjelasan



PERCIKAN API

Ismantoro Dwi Yuwono's Library

Tentang Soal-soal
TROTSKISME

OLEH:

ROESTAM EFFENDI

PENERBIT

PATRIOT

DJAKARTA

Katalog Dalam Terbitan Online (KDT-O)
Ismantoro Dwi Yuwono's Marxis Reference

SEDIKIT PENJELASAN TENTANG SOAL-SOAL TROTSKISME

Penulis: Roestam Effendi

(Judul asli sebelum dialihkan ke dalam bahasa Indonesia yang telah diperbaharui: “*Sedikit Penjelasan Tentang Soal-Soal Trotskisme*”)

Jumlah halaman buku asli (diterbitkan oleh Penerbit Patriot Djakarta 1950): 53 halaman.

Jumlah halaman setelah dialihkan (diterbitkan oleh Percikan Api): 30 halaman.

Dialihkan ke dalam bahasa Indonesia yang telah diperbaharui oleh: Ismantoro Dwi Yuwono

Editor (ed.): Ismantoro Dwi Yuwono (Isman)



Diterbitkan secara online di grup PUSTAKA MARXIS oleh penerbit: **PERCIKAN API**
Yogyakarta Di Musim Hujan—Februari 2015

Facebook: ismanfilsafat@yahoo.co.id

Diizinkan mengcopy dan menyebarkan sebagian atau keseluruhan untuk kepentingan menyuntikan kesadaran kelas dan mendorong terjadinya perubahan sosial yang lebih baik ke depan

--kaum buruh seluruh dunia membacalah!



2 – PERCIKAN API

Ismantoro Dwi Yuwono's Library

SEDIKIT PENJELASAN TENTANG SOAL-SOAL TROTSKISME

SEDIKIT PENJELASAN TENTANG SOAL-SOAL TROTSKISME

Ditulis Oleh: Roestam Effendi

Diterbitkan Oleh:
PATRIOT DJAKARTA 1950
PERCIKAN API 2015

KATA PENGANTAR

Brosur ini tidak meminta dan membutuhkan “Kata Pengantar.”

Isinya akan memberi penjelasan sama sendirinya.

“Kata Pengantar” ini hanya perlu untuk mengutarakan kepada sidang pembaca, bahwa tulisan ini sudah disusun pada bulan April 1947 yang lampau, yaitu diwaktu tuduhan-tuduhan tentang “Trotskisme” amat lancar dan cepat dilemparkan ke kening dan ke pundak orang yang tidak kita sukai. Mengingat kepada kesulitan-kesulitan penyiaran dimasa itu, maupun secara teknis dan politis, maka tulisan ini terpaksa diperbanyak dan disebar dari tangan ke tangan, bahwa soal “Trotskisme” itu masih terus dipercelemek secara sentimen semata-mata, untuk pukulan-pukulan yang merugikan satu sama lain, dimana sekarang ternyata, bahwa paham-paham oportunisme kanan dan kiri meresap dikalangan buruh yang dipengaruhinya serta mulai menumbuhkan akar-akar dikalangan kaum dan kawan-kawan revolusioner, sehingga merugikan kepada cara berpikir yang sehat dan dialektis, yang bukan sedikit membahayakan kemungkinan-kemungkinan yang akan kita hadapai, maka atas desakan kawan-kawan yang menghendaki obyektifitas dalam penerangan dan didikan politik, saya tidak berkebaratan yang tulisan saya yang telah lama itu dibeberkan secara luas dengan pertolongan percetakan. Lebih-lebih penerbitan ini dirasa perlu, karena sedikit sekali kawan-kawan menemui buku-buku yang menguraikan soal Trotskisme tersebut di dalam bahasa Indonesia kita.

Sebetulnya sudah seharusnya dan selayaknya uraian ini dirubah dan disusun kembali sesuai dengan kenyataan-kenyataan sekarang, guna lebih menegaskan soal-soal yang diperbincangkan. Karena memanglah sekarang sudah lebih banyak kenyataan-kenyataan dan contoh-contoh yang lebih baik buat dikemukakan sebagai bahan-bahan penerangan.

Sungguhpun demikian, mengingat kepada sifat “keaslian” dari tulisan ini, yang dikarang 3 tahun yang sudah diwaktu suasana panas mandidih, segalanya kita biarkan saja seperti semula. Kejadian-kejadian yang terdapat sekarang, malahan bisa dijadikan ujian tentang kebenaran apa yang telah kita ramalkan beberapa tahun yang lalu.

Kita percaya, sekurang-kurangnya mempunyai harapan besar, bahwa dengan uraian brosur ini, dapatlah pembaca, terutama sekali pemuda-pemuda Indonesia kita, yang akan menguasai Hari Depan, meninjau dan menganalisis sendiri soal-soal politik, yang ditemui mereka di sekitarnya, zonder (tanpa-ed.) dipengaruhi oleh anggapan sentimen, yang berkarat atau disiplin buta yang ditekankan dari atas!

Mudah-mudahan demikianlah hendaknya, sehingga tercapai suasana yang sehat.

Jakarta, November 1950.

Roestam Effendi



SEDIKIT PENJELASAN TENTANG SOAL-SOAL TROTSKISME

Memang sudah menjadi umum, kelaziman orang-orang memperjual-belikan kata-kata atau semboyan-semboyan di pasar percelotehan politik, zonder sedikit juga merasa bertanggung jawab atas arti dan akibat dari kata-kata yang diperkedaikan itu. Macam-macam semboyan dan hadis-hadis revolusioner dipersundalkan kepada rakyat jelata, yang belum dapat dalam umum dan hakekatnya memahami arti semboyan dan hadis, yang ramai-ramai dihambur-hamburkan itu. Melakukan spekulasi atas kekurangan pengetahuan umum tentang ISI dan MAKNA terminologinya, yang memang masih jauh dari rengkuhan pengertian khalayak-banyak, adalah sama artinya dan akibatnya dengan penipuan.

Salah satu dari kata-kata yang sering dibual-bualkan di muka, atau dihambur-hamburkan ke pundak rakyat umum, ialah perkataan “TROTSKISME,” disamping panji-panji “MARXISME-LENINISME,” yang diarak-usungkan, sebagai berhala-berhala mayat.

Rakyat Indonesia, yang dalam hakekatnya masih banyak memegang filsafat dan paham “idealisme,” yang masih banyak meyakini keajaiban-keajaiban takhyul dan gagasan, yang masih suka merenung-renungkan penciptaan angan-angan sendiri, pendek kata: kaum pekerja Indonesia, yang belum sempurna dapat memahami filsafat dan paham “materialisme,” kaum buruh kita yang masih ragu-raguan menerima kebenaran atau kejituan anggapan-anggapan perilmuan (*wetenschampelijke beschouwingswijze*), usahkan untuk mengetahui betul tentang duduk-duduk dan simpangsiurnya soal-soal Marxisme-Leninisme itu, untuk mendalami pasang-pasangnya strategie dan taktik Leninisme, tiba-tiba dibanjiri dan dipergila dengan segala semboyan-semboyan revolusioner, dimabokkan serta dibiusi dengan terminologi “Leninisme,” yang telah lebih dahulu dipalsukan isinya oleh para-pujangga oportuniste.

Rakyat Indonesia yang sedang bergembira dan bersatu tekad, siap-sedia untuk menentang musuh imperialis, yang akan merompaki pagar kemerdekaan Indonesia, yang akan merampok kedaulatan rakyat kita, maka rakyat Indonesia yang sedang berjuang itu diragu dengan béngbréng “Trotskisme,” zonder memberikan penjelasan yang terang dan obyektif, zonder memberikan patokan dan garisan tentang apa artinya “Trotskisme,” yang sebenarnya. Dengan demikian orang tidak saja dapat mengartikan perkataan “Trotskisme” secara semau-maunya ataupun seenak-enaknya, bahkan orang dapat pula dengan muslihat yang serupa itu menyodorkan segala, serta tiap-tiap perbuatan politik seolah-oleh itulah sikap dan pendirian revolusioner, seolah-olah itulah anggapan dan maksud Leninisme yang sejati. Rakyat jelata Indonesia, yang belum tahu benar apa yang dimaksudkan dengan terminologi “Trotskisme” selain dari suatu dengungan saja, tentu tiada dapat kita salahkan, kalau mereka menelan tuduhan-tuduhan tersebut mentah-mentah dan ikut di sana-sini menghoyak-hosenkan demit-demit “Trotskisme” itu, seperti yang memang dikehendaki oleh si penuduh-penuduh itu, oleh budak-bayaran dari kaum imperialis, yang sengaja disuruh mematahkan atau membelokkan arah revolusi kita kepada penjajahan kembali, sekalipun sekarang diukir-dibungarampaikan dengan janji-janji yang muluk-muluk.

Rupanya memang sudah menjadi, atau sengaja dijadikan “mode” di Indonesia ini, membungkus segala perbuatan borjuisme atau borjuis-kecil, membungkus segala siasat sosial kapitalis serta muslihat-muslihat dan tipu-daya, yang mewujudkan “damai-damaian” yang “harmonis,” atau “kompromi-kompromian” yang “berbijaksanaan peri-kemanusiaan murnian” itu, dengan etiket-etiket “Marxisme-Leninisme.” Politik kerja-bersama dengan imperialis “*een innige en oprechte samenwerking in een sfeer van wederzijds begrip en goede verstandhouding*” katanya, yaitu suatu politik yang dalam hakekatnya dan akibatnya semata-mata tidak lain dari pada mempekuat kedudukan imperialis itu dalam lapangan dunia internasional, serta hendak memasukkan Indonesia kembali ke dalam perangkap penjajahan Belanda, beramai-ramai dicet dan ditembeli dengan warna-warna “progresif,” dengan pertolongan pemimpin-pemimpin C.P.N (“De Waarheid”) di Belanda; dan di Indonesia ini oleh antek-anteknya Schermarhon-Drees, atau kacung-



kacungnya Paul de Groot, yang pernah mencoba mempertahankan di muka rakyat Belanda, bahwa lagu “Wilhelmus” itu adalah atau haruslah dijadikan “Volkslied” dari rakyat Belanda yang progresif,” politik kerja-sama, yang sedemikian itu dihidangkan kemuka umum, dibisikan ke telinga rakyat pekerja Indonesia serta dipaksakan kepada kaum buruh menerimannya, sebagai “siasat dan taktik dari Marxisme-Leninisme-Stalinisme-Dimitrovisme-Mao Tse-Tungisme.”

Sejarah perjuangan kemerdekaan dan perjuangan-kelas mengetahui cukup, bahwa segala aktifitas Marx dari semula sampai wafatnya, tidak lain dari pada mewujudkan penghancuran stelsel kapitalisme itu, mengetahui bahwa kegiatan teori dan praktek Lenin dimasa hidupnya tidak lain daripada melaksanakan perubahan imperialisme-kapitalisme, setidaknya dalam negeri sendiri dahulu; bukti-bukti cukup menerangkan, bahwa Stalin membasmi segiat-giatnya dan sekeras-kerasnya segala macam corak atau rupa dari paham-pamah kapitulasi terhadap musum imperialis, seperti dalam revolusi Rusia dahulu itu; juga Dimitrov dari semula tidak lain jang dianjurkannya dari pada penggalang demokrasi kaum pekerja, **yang bersandarkan kepada kekuatan buruh yang dipersenjatai**, dan tidak memperkuat demokrasi, yang akibatnya **melakukan perlucutan senjata rakyat** yang sedang menjalankan perlawanan anti-imperialisme; sekalian orang, yang mau berpikir dapat melihat, bahwa perbuatan Mao Tse Tung di Tiongkok itu sekali tidak ditujukan kepada muslihat cara bagaimana dia bisa “*acceptable*,” dan bisa “berunding-dan berserimpian” dengan Truman-Marshall-Atlee-Bevin, ataupun kepada politik yang patuh mentaati boneka-boneka, dan budak-suruhan kaum imperialis asing, seperti misalnya “marskalk Generalisimus Chiang Kai Schek! Ini jelas, ini bisa dikontroler dengan segala kenyataan perbuatan mereka sekalian. Akan tetapi segala-segala ini rupanya tidak dihiraukan oleh mereka yang memang diperintahkan oleh kaum imperialis untuk memikat rakyat Indonesia dengan gambaran dan tébéng-tébéngan “demokrasi” ala Truman atau Morgan.

Agar supaya jaring mereka jangan sampai dilihat kaum revolusioner, (yang tadinya banyak sekali menjauhi politik atau tidak mau mendalami soal-soal masyarakat jang sebenar-benarnya), maka perlulah hulubalang-hulubalang demokrasi kapitalis itu, segala pelajaran-pelajaran imperialis yang menyelundup dikalangan rakyat jelata. Itu, menceritakan dan merawak-rawakkan bahaya “Trotskisme,” Links radicalisme,” Anarcho-syndicalisme,” “Extremisme,” dsb. Segala sikap dan tindakan revolusioner dengan perbuatan yang konkret, segala paham-paham dan anggapan-anggapan politik, yang tidak disetujui oleh juta-juta prawira kaum imperialis itu, segala siasat dan taktik yang bisa membahayakan muslihat “kompromi” mereka dengan sang majikan lama, yang bisa mengancam tidur-nyenyaknya kaum imperialis Internasional, pendek kata: segala apa saja, yang menyimpang dari ataupun tidak sesuai dengan konsepsi “Marxisme-Leninisme” dari kaum oportunis itu, maka sudah tentu dengan secara kecepatan kilat dibubuhi etiket “Trotskisme,” artinya dicap sebagai barang-barang “kontrabande.” Dengan mengeluarkan tuduhan “Trotskisme,” sekali pun zonder ada alasan yang konkret, kepada salah seorang, maka dia ini tidak lagi mempunyai hak untuk hidup lebih lama dikalangan rakyat Indonesia.

“Trotskisme” itu identik, ya malahan lebih berbahaya lagi dari tuduhan “mata-mata musuh!”, agen-agen Nica!” yang sejati.

Dalam pada itu mata-mata musuh, yang sebenarnya diperkenankan simpang-siur mengedari daerah R.I. (Republik Indonesia-ed.) diperbolehkan mencongkol (mungkin: bercokol-ed.) di kursi-kursi pemerintahan. Penyelidik-penyelidik politik dari kaum imperialis asing diberi kesempatan sebagai “wartawan-wartawan luar negeri,” untuk mengintai dan mengetahui kelemahan rakyat dan pertahanan Indonesia, disamping mereka dihiburkan pula dengan gadis-gadis dan se-rimpian.

Pencinta-pencinta demokrasi kapitalis, serta budak-budak imperialis asing dilayani sebagai “penindas-penindas internasional,” dan disoja-soja (mungkin: disanjung-sanjung-ed.) sebagai “tetamu luar-biasa,” dengan secara “sopan-santun,” amat sangat memalukan muka.

Orang-orang yang mengutamakan kepentingan rakyat jelata Indonesia, yang memperjuangkan kepentingan ini dengan sungguh-sungguh menentang imperialisme dan antek-anteknya, orang yang



hendak merubuhkan imperialis Belanda di Indonesia ini, guna keperluan pembangunan SOSIALISME dan kemakmuran KAUM PEKERJA, lantas disekap, diculik, dibenamkan ke dalam penjara “*zonder vorm van proces,*” berbulan-bulan, bertahun-tahun, semata-mata karena mereka kebetulan dituduh sebagai “Trotskisten.” Jikalau kita tanyakan kepada orang-orang, yang ikut membual-bualkan tuduhan tersebut apakah yang mereka maksudkan dengan perkataan “Trotskisme” itu, maka boleh dikatakan” dalam sepuluh orang yang ditanyakan barang kali tidak ada seorang yang mengetahui tepat, apa arti “Trotskisme” itu sebetulnya. Artinya secara obyektif dan perilmuan.

Sungguh demikian, alasan “Trotskisme” sudah cukup mempunyai “*rechtkracht*” untuk mengorbankan kemerdekaan orang-orang, yang tidak sepaham dan sesiasat, kepada tindakan-tindakan fasis yang sewenang-wenang. Inilah rupanya akibat “demokrasi” itu, yang katanya akan dipertahankan dalam suatu “*Rechtsstaat* (negara hukum-ed.)”

Kekacauan pengertian tentang soal “Trotskisme” itu, menyebabkan rakyat pekerja Indonesia gampang sekali diombang-ambing oleh politik dan paham-paham oportunisme, maupun kanan atau kiri. Tetapi siapakah yang paling keras menjerit-jeritkan tuduhan tentang “Trotskisme” itu, ke muka gelanggan ramai? Yaitu mereka, yang sebetulnya berpaham dan bersifat Trotskistis sendiri, semata-mata guna menutupi kesalahan-kesalahan opporunis mereka sendiri. Agar supaya segala ini bisa diinsyafkan oleh khalayak banyak, dapat dikontroler oleh buruh Indonesia akan kebenarannya secara obyektif, beralasan atas perilmuan dan patokan-patokan yang tertentu, agar supaya kaum proletar kita jangan hanya mempergunakan sentimen belaka, yang mana dipersangkutkan kepada anti-dan sympathie subyektif dari seseorang kepada seseorang, agar supaya jangan diteruskan sewenang-wenang tentang mempermainkan kata-kata “Trotskisme,” yang sudah banyak mengorbankan orang-orang dengan percuma dan tiada bersalah, maka marilah kita coba menguraikan soal-soal Trotskisme itu di bawah ini, secara garis besarnya saja, sekedar menjadi penjelasan yang perlu pada para pembaca.

Kita akan menerangkan teori dan prakteknya paham-paham Trotskisme, yaitu tentang duduk dan pasang-pasangnya yang sebenarnya, dengan tiada menyinggung orang-orang atau partai-partai, yang menjalankan atau mentaati paham Trotskisme tersebut. Kita hanya hendak memberi pedoman dan patokan, yang tertentu guna meninjau dan menentukan sikap-sikap pemimpin-pemimpin revolusioner dan sikap sendiri dari masing-masing kita yang berjuang, supaya pera pembaca dan kaum buruh khususnya dapat mengontroler dengan bukti-bukti, yang dilihatnya sendiri siapa-siapa, yang Trotskistis dan siapa-siapa pula yang memegang teguh “generalelinie” dari perjuangan kelas proletar. Lainnya tersilah (mungkin: terserah-ed.) kepada pembaca.

Tiap-tiap “isme” mengutarakan salah satu paham dan logika berpikir, yang tertentu. Trotskisme, yang terbentuk dari namanya Leon Trostky, adalah logika pikiran dan uraian yang tersusun, yang merupakan suatu teori atau suatu sistem berpikir, yang tertentu. Trotskisme bukan saja merupakan teori-teori dan uraian-uraian pikiran, yang disusun oleh Trotsky sendiri, asal dari Trotsky sendiri, dikampungkan ke dalam pengertian Trotskisme itu. Maksudnya bukan saja hendak memudahkan soal-soal yang bersangkutan dalam perdebatan politik, akan tetapi juga beralasan atas anggapan, bahwa teori-teori dan pandangan-pandangan itu dasar dan pokoknya satu atau selaras. Sambil lalu boleh dikatakan di sini, bahwa dalam perdebatan politik, Stalin adalah orangnya yang pertama yang mempergunakan terminologi “Trotskisme” itu.

Perlu lebih dahulu diterangkan, bahwa dalam perdebatan politik dikalangan kaum Marxisme, dua aliran yang terbesar bertentangan hebat. Satu aliran yang lazim disebutkan dengan nama “**sosialisten**” atau juga sering dinamakan “**mensyewisten**,” dan satu aliran lainnya, yang menamakan dirinya “**komunisten**,” atau sebagai imbalan dari perkataan “**mensyewisten**” tadi, menamakan diri mereka “**bolsyewisten**.” Prinsip yang membelah dua kaum **Marxisten** ini, boleh kita perpusatkan kepada pertentangan anggapan tentang pengertian “DEMOKRASI” dan “PROLETARIS DIKTATUR” (DIKTATUR PROLETARIAT).



Kaum “sosialis,” yang dipelopori oleh Bernstein, Kautsky cs. beranggapan, bahwa pembalikan masyarakat kapitalis ke masyarakat komunis itu, dapat dilaksanakan dengan jalan “demokrasi.” Kautsky dibelakang hari baru berpaling kepada anggapan ini. Berdasarkan atas prinsip demokrasi tersebut (yang dimaksudkan mereka, ialah “demokrasi borjuis” atau “demokrasi kapitalis”) maka timbullah teori-teori tentang “klasse-harmonie,” “perdamaian-kelas,” “revolusi zonder mengorbankan darah,” peluncuran kapitalisme ke sosialisme, tentang teori “ultra-kapitalisme,” “kapitalisme yang murni,” dsb. dsb. Berdasarkan atas kemungkinan-kemungkinan teori tadi, maka kaum “sosialisten” atau mensyewisten, mau tidak mau, mestilah patuh dan taat kepada keharusan melaksanakan siasat “ministerialisme,” “parlementerisme,” “berembuk dan berunding,” “kerja-sama dengan borjuis,” atau ikut giat memperbaiki demokrasi kapitalis, pendek kata kaum “sosialisten” bersumpah kepada KEHARUSAN memburu kemenangan suara dalam badan-badan perwakilan, yang dijadikan syarat istimewa dalam perjuangan-kelas. Maka jelaslah, bahwa anggapan di atas itu, mau tidak mau, mestilah menolak adanya suatu DIKTATUR PROLETARIAT, yang menjadi syarat terpenting untuk melaksanakan revolusi proletaris.

Pihak komunis atau bolsyewist, yang dari semula dipelopori oleh Lenin cs., menentang keras teori-teori “demokrasi” di atas, dan kemungkinan-kemungkinan, yang dibayangkan. Pertentangan prinsipil antara kaum komunis dengan kaum “sosialis,” ialah bahwa kaum komunis yakin kepada keharusan penggalangan DIKTATUR PROLETAR. Mereka tiada percaya, bahwa pembangunan masyarakat sosialis itu dapat dicapai, zonder penghancuran kapitalisme-imperialisme lebih dahulu. Mereka tiada percaya kepada kemungkinan perubahan masyarakat kapitalis menjadi masyarakat sosialis, dengan jalan berparlemen-parlemen, bertukar-tukaran kursi kementerian saja, dengan jalan perjuangan stembilyet belaka!

Kaum komunis yang mempunyai keyakinan, bahwa stelsel kapitalis itu serta kekuasaan borjuis itu, hanya dapat dihancurkan dengan kekuatan dan kekerasan revolusi saja, yang HARUS DIPIMPIN OLEH DIKTATUR PROLETAR, yang dalam hakekatnya tidak lain dari pada “DEMOKRASI PROLETARIS.” Mereka hidup-mati memegang prinsip “DIKTATUR PROLETAR,” dan hanya mempergunakan segala kemungkinan-kemungkinan dari demokrasi borjuis itu untuk menggalang kekuasaan PROLETAR sebagai SATU-SATUNYA SYARAT YANG TERPENTING UNTUK BISA MENYELENGGARAKAN PEMBANGUNAN SOSIALISME.

Perbedaan prinsipil antara paham-paham di atas membelah dunia Marxisten atas dua golongan yang bertentangan hebat. Golongan “sosialisten,” yaitu yang bersumpah kepada “Demokrasi,” tergabung dalam “Internasionale II.” Golongan yang mempertahankan prinsip “Diktatur Proletar,” yang sebetulnya tidak lain dari pada demokrasi-proletarnya, tergabung ke dalam “Internasionale ke III” atau “Komintern.” Dalam soal “Demokrasi” atau “Diktatur Proletar” ini, dapatlah kita menentukan pedoman dan patokan-patokan kanan dan dalam pengertian perjuangan-kelas proletar. Ini cukup jelas agaknya. Trotsky dan para teoritis Marxisme lainnya, yang mana segala uraian-uraian dan anggapan-anggapan mereka merupakan paham “Trotskisme,” memang dari semula menentang paham oportunisme kanan, yang membuta kepada, dan membetaharagurukan teori-teori “demokrasi” belaka. Dalam soal ini jelaslah, bahwa Trotskisme sepangkalan dan sejalan dengan Leninisme, artinya sama-sama berdasar Marxisme dan sama-sama mempertahankan prinsip “Diktatur Proletar.” Dalam tingkatan soal penafsiran Marxisme sampai ke sini, maka Leninisme dan Trotskisme tidak bertentangan, dan tidak merupakan perbedaan anggapan, sehingga Leninisme boleh dikatakan berdekatan dengan Trotskisme. Inilah yang menyebabkan, makanya kaum Trotskisten tiada tergabung dan tiada mau menggabungkan diri KE DALAM “INTERNASIONALE KE II.” INILAH PULA SEBABNYA, MAKA KAUM TROTSKISTEN TERGABUNG DAN MENGGABUNGKAN DIRI kepada partai komunis Rusia khususnya, dan kepada “Internasionale III” atau “Komintern” umumnya. Orang-orang, yang tiada tahu-menahu tentang Marxisme itu, jangankan lagi orang-orang, yang tiada mengakui dan mentaati prinsipnya



“Diktatur Proletar,” tidak mungkin kita persalahkan dan tuduh-tuduh mempunyai paham dan penyakit Trotskisme.

Ini perlu diperingatkan disini, sebagai suatu patokan yang tertentu, sekalipun belum cukup. Kita catatkan, supaya jangan orang-orang serampangan saja menuduh-nuduh yang lain berpaham Trotskistis semata-mata oleh sebab dia bertentangan politik dengan kita, atau semata-mata sebab politiknya tidak kita setujui, ataupun kebetulan tiada sesuai dengan politik, yang kita jalankan. Kalau misalnya seorang Masyumi dan P.N.I. siap sedia melaksanakan politik anti-imperialis, seperti melaksanakan program-politik dari PERSATUAN-PERJUANGAN, lantas kita maki dan tuduh dengan mengatakan mereka “Trotskisten,” maka ini adalah perbuatan sewenang-wenang yang tiada berdasar kepada syarat-syarat perilmuan sedikit juga pun. Sebaliknya pula orang-orang Masyumi atau P.N.I., yang lari meninggalkan PERSATUAN-PERJUANGAN, karena digertak dan dimaki-maki oleh orang-orang PKI dengan tuduhan-tuduhan “Trotskisme,” mereka cuma menunjukkan kedunguan mereka saja tentang arti kata-kata tuduhan tersebut.

Apabila kita memakai perkataan “Trotskisme” itu secara sewenang-wenang seperti di atas tadi, maka mau tidak mau, kita membukakan kemungkinan besar untuk mengatakan, bahwa seluruh rakyat Indonesia ini bersifat dan berpaham “Trotskistis,” dengan tak sedikit juga memperdulikan, apakah mereka “marxistis,” atautah “bukan marxisten” dengan tidak menghiraukan anggapan-anggapan mereka tentang soal “demokrasi” dan “diktatur” dalam perjuangan, asal saja kita mengambil alasan, bahwa rakyat Indonesia atau yang dituduh itu mempunyai anggapan dan politik lain dari kita sendiri, seperti yang betul-betul sudah terjadi di Indonesia kita ini.

Orang-orang yang mengobrolkan soal-soal Leninisme semacam itu, dalam hakekat dan akibatnya cuma merendahkan derajat Leninisme, dan sebaliknya membesarkan pengaruh dan sumarak paham-paham “Trotskisme.”

Program-politik dari PERSATUAN PERJUANGAN, yang tadinya oleh pujangga-pujangga Leninisme, yang menurut katanya mondok di bawah atap “Sayap Kiri,” dicap sebagai suatu program yang paling radikal, yang katanya bersifat dan berbau watak Trotskistis, maupun secara teoritis ataupun secara praktis, tiada sedikit juga menyenggol-nyenggol soal Trotskisme, artinya dalam program-politik dari PERSATUAN PERJUANGAN itu belumlah ada anasir-anasir, yang dapat dipersoalkan dan dipertanggung-jawabkan sebagai bahan-bahan Trotskisme. Mungkin ada orang-orang yang berpaham dan bersifat Trotskistis menyetujui program-politik dari PERSATUAN PERJUANGAN itu, sebagai dan secara “individueel,” akan tetapi program-politik itu sendiri secara obyektif, terlepas dari soal siapa yang menyusun dan mempertahankan program tersebut, adalah satu-satunya dasar siasat perjuangan kelas, yang tepat sekali untuk phase perjuangan kemerdekaan diwaktu dan di dalam keadaan semasa itu, yang harus diselenggarakan oleh bangsa Indonesia, yaitu oleh segala lapisan masyarakat kita diwaktu yang tersebut. Program-politik dari PERSATUAN PERJUANGAN diwaktu itu adalah suatu program perjuangan-kelas, yang secara obyektif bertepatan dan selaras sekali dengan SIASAT dan TAKTIK Leninisme, yang sebetul-betulnya, terlepas dari anggapan dan paham subyektif dari orang-orang, yang hendak menjalankannya.

Kita malahan berani mengatakan di sini, bahwa secara obyektif dan teoritis machanis bahwa program-politik dari PERSATUAN PERJUANGAN dimasa itu menurut tinjauan Trotskistis sendiri belum cukup jauh, belum “radikal,” sehingga dalam prinsip dan teorinya mungkin sekali bertentangan dengan paham-paham Trotskisme sejati.

Kita uraikan di atas tadi, bahwa ada masa dan phase-nya beda Leninisme dan Trotskisme itu tidak terlahir keluar, sehingga di dalam saat dan phase yang tertentu mungkin paham Leninisme seperjuangan dengan Trotskisme di dalam prakteknya. Ini bukan saja dibuktikan oleh perjuangan Trotsky, yang keluar-masuk dalam partai Lenin diwaktu dahulunya akan tetapi juga dinyatakan oleh sikap dan pendirian kaum Trotskisten selama peperangan dunia ke II ini. Dimana paham Leninisme dan Trotskisme tidak merupakan pertentangan, dimana kedua sikap ini dapat berjalan selaras dalam melaksanakan siasat masing-masingnya, maka jelaslah bahwa secara obyektif tiap-tiap usaha dan



muslihat, yang tiada lain perlunya dari SENGAJA MEMECAH PERSATUAN PERJUANGAN rakyat pekerja, yang konkret, dengan jalan menonjolkan genduruwo “Trotskisme,” seperti yang dikerjakan oleh kaum “Leninisme” dari “Sayap-Kiri” dahulu itu, adalah usaha dan muslihat untuk melemahkan dan mematahkan perjuangan anti-imperialis, suatu jalan yang halus untuk memasukan kembali kekuasaan imperialisme di Indonesia ini.

Dasar siasat dari program-politik dari PERSATUAN PERJUANGAN sebenarnya, adalah selaras dengan dasar siasat dari politik “demokrasi,” yang diselenggarakan oleh kaum Leninisten di Yugoslawiya, di Tsyechoslowakiya, di Bulgariya, di Ponia dan di Tiongkok-Soviet. Politik oportunisme di Indonesia ini merupakan tipu: muslihat, yang dengan teori dan mulut menghoyak-hosenkan perbuatan revolusioner di Rusia, Tsyechoslowakiya, Yugoslawiya, Tiongkok-Mao Tse Tung dll.-nya, dan dengan perbuatan secara praktis menghancurkan tindakan-tindakan dan kemungkinan-kemungkinan revolusioner di negeri sendiri.

Dimanakan mulai timbul pertentangan paham Leninisme dengan Trotskisme? Tidaklah dalam kepercayaan pada keharusan adanya DIKTATUR PROLETAR, sebagai syarat-mutlak untuk melaksanakan revolusi proletar sosialis, akan tetapi dalam menafsirkan pengertian DIKTATUR PROLETAR itu, serta segala konsekuensi dan akibat-akibatnya dari penafsiran itu. Trotsky dan orang-orang yang sepaham dengan dia, menafsirkan arti DIKTATUR PROLETAR itu, sebagai suatu **kekuasaan yang hanya bisa atau mesti digalang oleh tenaga-tenaga proletaris melulu. Segala tenaga** di luar lingkungan itu, merupakan musuh dari tenaga proletaris. Dengan demikian penggalangan kekuatan “diktatur proletar” hanya mesti didasarkan kepada tenaga-tenaga proletaris saja.

Tiada begitu anggapan Lenin dan Leninisme. Lenin dan Leninisme menafsirkan arti DIKTATUR PROLETAR, sebagai suatu **kekuasaan dari persekutuan kaum proletar dengan kaum tani**. Leninisme berpendapat, bahwa kaum tani itu mempunyai kemungkinan-kemungkinan, sehingga dapat dijadikan kawan oleh kaum proletar. Dengan jalan demikian, maka Leninisme menganggap, bahwa kaum tani itu, tidak **melulu harus menjadi musuhnya kaum proletar**.

Oleh karena itu Leninisme mendasarkan penggalangan kekuatan dan kekuasaan **DIKTATUR PROLETAR**, kepada tenaga-tenaga proletaris dan tenaga-tenaga a-proletaris, artinya yang bukan langsung bersifat proletaris.

“Diktatur Proletaris adalah suatu macam persekutuan kelas yang bersifat istimewa, antara kaum proletar sebagai pelopor dari kaum pekerja, dengan lapisan-lapisan kaum pekerja lainnya, yang kembang-biak itu dan yang tidak bersifat proletaris, (borjuis-cilik, pemilik-pemilik kecil, kaum tani dan cerdik-pandai, dsb.) atau dengan golongan yang terbanyak dari mereka itu; ini adalah persekutuan menentang kapital, suatu persekutuan yang maksudnya perubahan penuh dari kapital itu, penekanan penuh terhadap perlawanan borjuis dan terhadap segala akal-muslihat mereka akan berdiri kembali, yaitu persekutuan, yang berujud akhir-akhirnya menegaskan dan memperkuat sosialisme.” Demikianlah definisi Lenin tentang Diktatur Proletar itu.¹

Dengan keterangan di atas teranglah, bahwa Lenin mementingkan sekali persekutuan-kelas (*klasseverbond*) antara kaum proletar dengan lapisan-lapisan kaum pekerja yang a-proletaris, yang dinamakan oleh Lenin, **suatu persekutuan-kelas, yang bersifat istimewa**. Apa sebabnya, maka *klasseverbond* ini bersifat istimewa? Oleh karena “persekutuan antara kelas-kelas, yang di dalam pengertian ekonomis, politis, sosial dan rohani, tidak sedikit juga sama derajatnya.”

Soal tentang kerja-sama antara kaum proletar dengan lapisan-lapisan a-proletaris, terutama sekali dengan kaum taninya, memang dari semula menjadi **pusat-perhatian** dan **inti-mutlak** dari

¹ Y.W. Stalin: “*Tentang Dasar-Dasar Leninisme (Ceramah Yang Diberikan di Universitas “Komunis” Swerdlov).*”



teori-teori dan uraian-uraian Lenin, di dalam beliau mengupas arti DIKTATUR PROLETAR itu. Soal-soal persekutuan ini sangat dipentingkan sekali oleh Lenin, setelah beliau menyelidiki dan mengetahui duduk-duduk, seluk-beluk dan sifat-sifatnya imperialisme, yang telah jauh berbeda dari sifat-sifat kapitalisme, semasa Karl Marx menguraikan soal-soal perjuangan kelas, sekalipun imperialisme itu tidak lain dari konsekuensi dan penerusan dari pertumbuhan kapitalisme itu juga. Leninisme memanglah tidak bersifat mekanis, artinya tidak mengambil “over” semata-mata, segala “stellinge” yang dikemukakan oleh Karl Marx, diwaktu keadaan dan suasana yang berlainan. Trotsky, karena bersifat mekanis, mau tidak mau, mestilah tetap mentaati dan memegang teguh thesis-thesis Karl Marx, yang isinya tiada lagi sesuai dengan keadaan konkret diwaktu sekarang. Baiklah ini nanti kita jelaskan lebih lanjut.

Kita lebih dahulu hendak menguraikan paham-paham Leninisme, tentang “Diktatur Proletar itu, supaya tegas bagi sekalian pembaca. Bagaimana pentingnya soal persekutuan kaum proletar dengan kaum tani itu, dapatlah, dilihat di dalam, tulisan Lenin: “Kata pengantar pidato-pidato untuk kaum taninya. Tentang teori dan anggapan Lenin, maka dapatlah dipahamkan dari uraian-uraian beliau, yang berkali-kali diulanginya. Dalam pidato Lenin dalam kongres “Komintern” ke III beliau sekali lagi menekankan titik-berat dari arti kata “Diktatur-Proletar itu.

“Prinsip yang tertinggi dari diktatur itu (yang dimaksudkan disini, ialah “diktatur proletar,”-pen.), ialah mempertahankan persekutuan kaum proletar dengan kaum tani, supaya kaum proletar dapat memegang rol pemimpin dan kekuasaan-negara.”

Dalam kesempatan lain Lenin pun pernah berkata: “Hanya suatu persetujuan dengan kaum tani sajalah, yang dapat menolong revolusi sosial di Rusia, selama revolusi-revolusi di negeri lain belum bergolak.”

Cukuplah dengan mengemukakan ucapan-ucapan Lenin di atas saja guna menegaskan, bahwa yang menjadi, atau yang harus dijadikan inti-istimewa dari LENINISME, adalah “siasat dan muslihat kaum proletar untuk kerja-sama dengan golongan-golongan a-proletaris terutama kaum taninya, guna-menurut kata Stalin, **“merubuhkan kapital dan mencapai kemenangan sosialis yang definitif, atas syarat-syarat, bahwa kekuatan pimpinan dari persekutuan ini dirupakan oleh kaum proletar sendiri.”** Karena berdasar atas anggapan-anggapan di atas tadi, maka itulah sebabnya sikap Trotskisme itu tidak dapat menyesuaikan “tampan” atau “vorm” perjuangan-kelas proletar itu dengan keadaan-keadaan yang konkret, yang didapati pada masa dan tempatnya. Dalam soal ini, maka bolehlah dikatakan, bahwa Trotskisme itu identik dengan sifat-sifat **schematisme**. Dalam praktik politik, ataupun dalam sejarah perjuangan-kelas, maupun dalam lingkungan nasional, atau dalam lapangan internasional, maka terbukti berkali-kali serta jelas sekali, bahwa paham Trotskisme itu **gampang kena diprovoceer**, bahkan pula sering juga sendiri memprovoceer perjuangan-kelas proletar, yang menguntungkan dan bisa menguntungkan kepada musuh.

Akibat dari teori “permanente revolutie” yang timbul dari paham Trotskisme itu, dapatlah misalnya kita lihat dalam sikapnya Trotsky cs. menentang habis-habisan pelaksanaan Naskah Brest-Litowsk, diwaktu perjuangan revolusi proletar di Rusia itu menghendaki dan membutuhkan sangat “adempauze,” yaitu disaat timbulnya keharusan membangun ekonomi sendiri, keharusan mengkonsolideer kekuatan dan susunan negara proletar, diwaktu keharusan ini menjadi soal yang hanya sekali. Keharusan membangun **sosialisme**, dan **mengkonsolideer negara sosialis** diwaktu itu menjadi soal yang terpenting sekali untuk menjelaskan revolusi Rusia, menjadi soal “*to be or not to be*” bagi nasibnya kemenangan revolusi rakyat Rus dimasa itu. Ini cukup diketahui umum. Sungguhpun begitu Trotsky cs. menentang keras Naskah-Brest-Litowsk, yang akan diselenggarakan oleh pihak Leninisten diwaktu itu. Kedua belah pihaknya beralasan atas patokan-patokan logika, seperti yang kita uraikan di atas. Kepelesetan anggapan Trotskisme dalam soal ini cukup diketahui oleh umum sekarang. Baiklah. Bagaimana sekarang punggawa-punggawa “Leninisme” yang sejati?



Secara schematis mereka menuduh segala orang, yang dalam revolusi Indonesia sekarang ini menentang habis-habisan pelaksanaan Naskah Linggajati, seolah-olah mereka sekalian berpaham “Trotskistis.” Pahlawan-pahlawan politik-berkopromi dengan Belanda, artinya **dengan imperialis Belanda** yang diwakili oleh Van Mook-Schermerhorn cs., pembela-pembela “Naskah Linggajati” menanamkan dirinya atau di dewa-dewakan sebagai “Leninisten” sejati. Tidak perlu diterangkan perpanjang-lebar, bahwa elektikisme yang menyamakan Naskah-Brest-Litowsk dengan Naskah Linggajati secara mekanis dan schematis begitu saja, zonder menyelidiki isi dari kedua naskah tersebut, dan zonder memperhatikan suasana dan keadaan-keadaan konkret diwaktu masing-masingnya, sudah mempunyai sifat-sifat Trotskisme. Apakah pemalsuan yang digemborkan ke muka rakyat pekerja Indonesia itu, dilakkan **dengan sengaja, atau tidak sengaja**, apakah atau dari kurang pemahannya tentang mempergunakan dialektika Leninistis, tiada perlu dan tiada gunanya kita persoalkan di sini. Kita hanya hendak menjelaskan secara obyektif, terlepas dari pada pengaruh sentimen, dimana sebenarnya tersembunyi sifat-sifat dan paham-paham Trotskistis itu.

Marilah kita kupas soal naskah kedua itu lebih jauh. Kita selidiki **suasana** dan isi keduanya.

Secara strategis-militer dan strategi-ekonomi, maka keadaan di Rusia memang sekali memaksa Lenin dan kaum Bolsyewiki dimasa itu melaksanakan Naskah-Brest-Litowsk, dengan imperialis Jerman.

Secara politis dan moril, revolusi Rusia terisolir dan berdiri sendiri, sebab belum bisa mendapat tunjangan lekas dari luar. Opportunisme sosial-chauvinisten terlalu kuat dan hampir memonopolikan sikap kaum buruh di luar Rusia. Perjuangan kemerdekaan di negeri-negeri jajahan belum memuncak tinggi betul.

Secara strategi-militer dan secara strategi-ekonomis, maka keadaan obyektif di Indonesia ditahun 1945 tidak sedikit juga memaksa kita untuk menerima naskah “Linggajati” dengan imperialis Belanda, yang diwaktu itu tidak sedikit juga mempunyai tenaga apa-apa, sedang engap-engapan. Secara politis dan moril, revolusi Indonesia tidak lagi terisolir dan akan pasti mendapat tunjangan politis dan moril dari luar. Keinsafan proletar Internasional sudah lebih kuat, seperti juga ternyata dari tindakan-tindakan buruh di luar negeri disaat revolusi Indonesia kita. Perjuangan kemerdekaan di negeri-negeri jajahan lainnya, memuncak keras, seperti ternyata dari kejadian-kejadian di benua Asia ini.

Sekarang tentang isi dari kedua naskah tersebut.

Imperialis Jerman, yang ikut tergencet dan digencet oleh imperialis Inggeris dan Perancis, siap-siap untuk melawan musuh mereka. Naskah Brest Litowsk berarti mengadu-dombakan tenaga-tenaga imperialis di lapangan mereka sendiri, serta dengan jalan demikian hakekatnya menetralsir sebagian dari kekuatan musuh, yang hendak menyerbu rakyat Rus.

Imperialis Belanda, yang sudah tergencet dan digencet oleh imperialis Inggeris dan Amerika, dan sudah dijadikan antek-anteknya dari kedua imperialis raksasa tadi, sehingga Belanda sedikit juga ada bermaksud untuk melawan imperialis Angelsaksis diwaktu pelaksanaan naskah “Linggajati” tidak dapat dianggap, sebagai suatu “**siasat**” untuk mengadu-dombakan tenaga-tenaga imperialis, yang akan menekankan revolusi kita kembali. “Naskah Linggajati” tidak bersifat dan tidak pula mungkin bersifat menetralsir imperialis Belanda atau salah satu bagian dari imperialis dunia, yang sangat ditakuti oleh oportunis itu.

Naskah Brest-Litowsk mengandung pengakuan kedaulatan rakyat Rus “de facto” diseluruh daerah Rusia oleh dan dari pihak imperialis Jerman. Naskah Brest-Litowsk tidak menghendaki kerugian ini atau kerugian itu dari pihak Rusia tidak menghendaki hak-campur-tangan (*inmengingsrecht*) atas cara-cara pembangunan negara di Rusia, serta akhir-akhirnya tidak menuntut pengembalian harta-milik imperialis ke tangan mereka.

“Naskah Linggajati” menghendaki pengakuan kedaulatan Baginda Ratu Wilhelmina di Indonesia ini, dan tidak sekali-sekali mau bermaksud hendak mengaku kedaulatan rakyat Indonesia dalam daerah R.I. (Republik Indonesia-ed.). Imperialis Belanda mempertahankan “*historische*



rechten” mereka di Indonesia ini, dan memaksa R.I. via naskah Linggajati agar segala harta-kekayaan dan hak milik asing dikembalikan kepada Belanda. Pendek kata: “Naskah Linggajati” tidak bisa diartikan sebagai suatu muslihat untuk **membangun sosialisme** dan **mengkonsolideer negara sosialis**. Naskah Linggajati, yang mengujudkan pengembalian sumber-sumber dan kunci produksi masyarakat ke tangan musuh, dalam hakekat dan akibatnya adalah suatu jaminan, supaya kekuasaan imperialis di Indonesia tidak dapat dirubuhkan, dan pembangunan sosialisme tidak dapat diselenggarakan. Naskah Linggajati ini mau tidak mau, akan mengacau-balaukan dan mengalutkan ekonomi rakyat Indonesia di belakang hari. “Linggajati” bukanlah suatu kemenangan bagi tenaga revolusi Indonesia, tetapi adalah **penghinaan** dan **perbudakan** bagi rakyat revolusioner Indonesia.

Dengan penjelasan di atas cukuplah bisa diketahui, bahwa kedua naskah tersebut dalam segala-galanya berbeda seperti malam dengan siang, selain dari pada bunyi “persetujuan” itu saja. Mengobrolkan kepada rakyat, bahwa naskah “Brest-Litowsk” bersamaan dengan naskah “Linggajati,” hanya bisa timbul dari paham-paham sehematisme dan mekanisme saja, yang menjadi dasar dari anggapan-anggapan dan pemandangan-pemandangan Trotskistis. Menyodorkan ke muka umum, seolah-oleh politik pemimpin kita di waktu itu, seperti yang diselenggarakan oleh Soetan Sjahrir, Amir Sjariffoedin, Abdoelmadjid, Sardjono, Setiadjid, Maroeto Daroesman, dll.-nya bersifat anti-Linggajati, jadinya ANTI-IMPERIALIS sebagai politik Trotskistis adalah suatu muslihat halus sekali untuk menyembunyikan watak-watak Trotskistis sendiri. Pendek kata: menyodorkan paham dan logika mekanisme dan sehematisme ke tengah gelanggang politik, yang dalam hakekatnya adalah “karakter-trek” dari paham-paham Trotskisme, sebagai paham-paham Leninisme, sama artinya dengan keinsyafan dan penuh-tanggung-jawab, sengaja mendustai dan menipu rakyat pekerja. Hasil politik avontur ini kelak akan ternyata di belakang hari.²

Wait and see.

Sekarang ini cuma baru menyedihkan hati saja, bahwa orang-orang yang berwatak dan berpaham Trotskistis yang sebenarnya, masih menongkol dan masih dibiarkan saja menongkol dalam pimpinan partai-partai dan organisasi rakyat revolusioner.

Selain dari pada Trotskisme itu, tidak saja tidak percaya kepada kemungkinan revolusioner dari pergerakan tani, artinya tidak percaya, bahwa kaum tani itu bisa merupakan **pergerakan revolusioner bersama-sama dengan kaum proletar**, maka Trotskisme itupun sebaliknya tidak pula mempunyai kepercayaan, tidak sedikit mempunyai keyakinan kepada kemungkinan-kemungkinan dari pihak kaum buruh **untuk menarik** dan memimpin kaum tani itu ke dalam perjuangan revolusioner. Beralasan atas anggapan di atas ini, maka mau tidak mau, mestilah Trotskisme berpendapat, bahwa revolusi sosial atau revolusi proletaris itu tidak mungkin dapat diselenggarakan dengan pertolongan tenaga-tenaga a-proletaris sebagai tenaga reserve. Apa sebab tidak mungkin?

Karena menurut anggapan Trotskisme, lama-kelamaan dan akhir-akhirnya mestilah kaum proletar itu akan bentrokan juga dengan massa kaum pekerja yang kembang-biak itu.

Berbicara tentang soal kewajiban kaum proletar, sesudah kaum proletar itu dapat merampas kekuasaan negara, Trotsky sendiri pernah menulis dalam bukunya “Tahun 1905,” seperti berikut:

“Kaum proletar tentu akan bentrokan, bukan saja dengan segala macam golongan dari kaum borjuis, yang tadinya ikut serta menolong perjuangan revolusi itu, bahkan pula akan bentrokan juga dengan lapisan yang luas dari kaum tani sendiri, dengan pertolongan siapa kaum proletar tadinya sudah mendapat kekuasaan.”

Bagaimana konsekuensi dari pendirian yang seperti di atas itu?

² Apa yang diramalkan di sini, memang juga terjadi di tahun 1948 dengan terjadinya peristiwa-Madiun (Penerbit, 1950).



Oleh karena mempunyai keyakinan, bahwa kaum proletar itu akhir-akhirnya toh akan bentrok juga dengan kaum tani, maka sikap Trotsky selalu menentang keras terhadap kaum tani.

Trotskisme tidak sedikit juga mau mementingkan soal-soal dan tuntutan-tuntutan kebutuhan dari kaum tani. Trotskisme hanya membuta saja kepada kemungkinan-kemungkinan proletar, sehingga hanya mementingkan soal-soal dan kepentingan proletaris semata-mata. Oleh sebab Trotskisme tidak sedikit juga butuh kepada kerja bersama dengan kaum tani.

Bahwa sifat-sifat yang sedemikian itu adalah sifat yang berakibat contra-revolusioner, artinya yang akan melemahkan kekuatan revolusioner dari rakyat yang berjuang, tidak perlu kita jelaskan lebih jauh. Bukti-bukti dengan kejadian-kejadian di Rusia, cukup menunjukkan, bahwa teori Trotskisme itu sama sekali terkepeleset dan salah. Revolusi di Rusia, dimana rakyatnya yang terbanyak terdiri dari elemen-elemen a-proletaris, tiada akan bisa mencapai dan mempertahankan kemenangan sosialis di sana, kalau tidak dengan tunjangan dan soliditas, kalau tidak dengan pertolongan persekutuan dengan kaum tani. Belakun mempraktekkan teori tersebut di Oenggaria yaitu menegakkan pemerintah proletar, yang terisolir dari rakyat petani yang banyak itu.

Pemerintah buruh yang semacam itu, hanya bisa dipertahankan beberapa hari saja.

Paham Trotskisme yang semacam di atas itu banyak sekali mengembang di kalangan kaum komunis Indonesia di muka tahun 1926/1927. Kegagalan pemberontakan di tahun 1926/1927, selain dan terlepas dari syarat-syarat obyektif dimasa itu, tidak sedikit disebabkan oleh anggapan-anggapan Trotskistis, yang sangat sekali mempengaruhi pimpinan politik dari P.K.I. disaat itu. Pimpinan P.K.I. di masa dewasa itu, seperti juga ternyata dari tindakan-tindakan dan cara-cara mereka menjalankan aksi dan propaganda P.K.I. yang sangat diperpusatkan perhatiannya kepada tenaga-tenaga proletar saja, sehingga tiada memperdulikan soal yang hidup dalam kalangan rakyat pekerja lainnya. Di negeri agraria, seperti Indonesia ini, dimana kira-kira setidak-tidaknya 85% dari rakyat bersifat a-proletaris, dan tidak dapat dengan lantas menyesuaikan diri dengan cita-citanya kaum proletar, dimana ideologi feodal dan borjuis-cilik sangat sekali mempengaruhi pikiran dan pandangan rakyat pertanian Indonesia diwaktu itu, maka kaum proletar harus mempelajari seluk-beluknya ekonomi kaum a-proletaris, karena sungguh-sungguh sekali menyokong dan memperjuangkan kebutuhan ekonomi mereka, harus jangan mengabaikan tuntutan-tuntutan hidup dari kaum tani itu, harus jangan secara serampangan saja membasmi atau mengejek ideologi rakyat, yang masih tebal itu. Hanya dengan jalan demikianlah kaum proletar dapat menjadikan kaum pekerja lainnya itu kawan-seperjuangan, terikat dan tergabung dalam kebutuhan yang bersama. Secara obyektif harus diakui, bahwa usaha dan muslihat untuk menarik kaum petani ke arah perjuangan buruh, untuk memupuk perasaan solidier di kalangan kaum tani terhadap perjuangan-kelas proletar, tidak dipentingkan oleh para pemimpin P.K.I. dimasa itu.

Perhatian P.K.I. diwaktu itu semata-mata diperpusatkan kepada soal-soal proletar saja, setidak-tidaknya kepada soal-soal buruh kota saja. Pemogokan-pemogokan kereta-api dan rumah-gade dimasa itu yang memang mesti diakui sebagai “vorm” perjuangan-kelas yang penting dan memuncak sekali, sudah dipandang sebagai syarat-syarat obyektif yang masak untuk melakukan pemberontakan di tahun 1926/1927. Rupanya para pemimpin P.K.I. dimasa itu, yang dikepalai oleh Sardjono-Boedisoetjitra cs., sangat sekali mengutamakan “pertolongan proletar dari luar” (suatu facet lain dari paham Trotskisme), spesial dari Rusia, yang katanya akan mengirimkan kapal perang, kapal-terbang, tentara merah, dll. dongengan yang bukan-bukan saja.

Beralasan atas anggapan Trotskisme itu, maka P.K.I. diwaktu itu tidak menghiraukan, keperluan MASSA-AKSI dan syarat-syaratnya, yang mesti ikut dirupakan oleh aksi-aksi rakyat pekerja a-proletariat, terutama sekali kaum tani di Indonesia. Putusan “Prambanan” yang diambil oleh pimpinan P.K.I., yang tidak disetujui oleh Tan Malaka adalah suatu putusan yang gegabah.

Ditinjau dari sudut persoalan ini saja, secara obyektif harus kita mengatakan, terlepas dari keyakinan-keyakinan subyektif dari mereka yang memutuskan, bahwa putusan tersebut didorong



oleh, atau setidaknya tidaknya dipengaruhi sangat oleh paham-paham dan anggapan-anggapan Trotskistis.

Oleh kesesatan dan kesalahan Trotskistis dari pemimpin-pemimpin P.K.I. dimasa itu, maka itulah sebabnya pemberontakan di tahun 1926/1927 terisolir dari rakyat pekerja lainnya. Karena melupakan atau mengabaikan kepentingan kaum tani itu, maka diwaktu pemberontakan itu bergolak ternyata, bahwa kaum tani dan kaum pekerja lainnya di desa-desa tidak menjadi kawan seperjuangan, malahan menjadi tenaga reserve dari musuh proletar, yang ikut serta memukul dan menggagalkan pemberontakan 1926/1927 itu. Se-untung-untungnya kaum tani Indonesia diwaktu itu sebersifat pasif, sehingga perlawanan revolusioner dari kaum proletar tidak disokong dan didukung oleh rakyat yang luas. Kesalahan-kesalahan subyektif ini, sekarang jelas. Sekalipun kita akui dan mesti akui, bahwa diwaktu itu belum dapat kawan-kawan kita memperoalkan sikap-sikap LENINISME atau TROTSKISME, karena kelemahan teori revolusioner, kekurangan pengetahuan Marxisme yang sempurna dikalangan para pemimpin "Marxisten" kita, akan tetapi hal ini perlu juga diselidiki dan dianalisis kembali, bukan dengan maksud umpat-mengumpati kawan-kawan yang sudah kepleset, tetapi untuk memperbaiki jalan perjuangan-kelas di Indonesia kita ini.

Revolusi atau salah satu pemberontakan tidak dapat digerakan dengan sebuah "decreet" atau "pamflet," yang disusun di atas meja hijau saja. Revolusi itu menghendaki syarat-syarat obyektif, yang konkret dan tertentu. Apabila syarat-syarat ini belum ada, dan belum cukup masak untuk melahirkan revolusi, yaitu syarat yang bersangkutan dengan keadaan-keadaan ekonomi nasional dan internasional, yang harus diselidiki tepat-tepat dan bersifat konkret, maka sia-sialah dalam keadaan yang sedemikian itu, memulai atau mencoba-coba revolusi atau pemberontakan. Perbuatan yang sedemikian itu, adalah perbuatan *ovuntuurlijk*, yang membahayakan perjuangan-kelas. Sebaliknya pula kata Lenin, kalau kita sudah memulai revolusi, mestilah pergolakan ini diteruskan sampai kepada akhirnya. Baiklah. Ditahun 1926-1927 syarat-syarat obyektif untuk mengadakan pemberontakan belum cukup masak, seperti juga ternyata dari *ontwikkeling* dan hasil-hasil dari tindakan tersebut. Artinya belum masak, dan belum sempurna ditinjau dari kacamata perilmuan Leninisme, kalau dimaksudkan sebagai penghancuran kekuasaan imperialisme di Indonesia. Dipandang dari sudut umum, sudah tentu aksi-aksi ditahun 1926/1927 berharga besar untuk kelanjutan perjalanan kemerdekaan rakyat Indonesia. Karena memanglah tidak ada seorang revolusioner, yang bisa atau mau menjalankan dan mengumpati timbulnya salah satu pergolakan. Pemberontakan ditahun 1926/1927 memang tidak sedikit memberi pengajaran buat rakyat dan perjuangan kemerdekaan kita. Sekalipun begitu, segala ini bukanlah mesti dijadikan penutup kesalahan-kesalahan subyektif, yang telah diperlakukan oleh pemimpin P.K.I. dimasa dewasa tersebut.

Jikalau syarat-syarat obyektif ditahun 1926/1927 tidak ada atau tidak cukup sempurna masaknya mengapakah "Prambilan" memutuskan untuk mengadakan pemberontakan?

Apakah yang menjadi dasar-dasar dari anggapan dan teori pemimpin-pemimpin P.K.I. diwaktu itu? Selainnya dari perbuatan-perbuatan mereka diprovokasi oleh agen-agen P.I.D., yang sudah menyelundupkan pengaruhnya ke dalam pimpinan P.K.I., maka pemberontakan ditahun 1926/1927 itu, juga sangat dipengaruhi oleh paham-paham Trotskisme, yang mementingkan soal "Revolusi Dunia," yang mesti berlaku sekaligus, sekali serentak. Pemberontakan ditahun 1926/1927 sebetulnya tidak digerakkan menurut dan beralasan atas keadaan di Indonesia sendiri, akan tetapi menurut konsepsi Trotskisme, yaitu menyelenggarakan teori "permanente revolusi," dan melaksanakan **Revolusi Dunia sekali serentak**. Artinya pemberontakan ditahun 1926/1927 semata-mata berpedoman kepada kepentingan "revolusi internasional."

Teori-teori dan paham-paham Trotskisme yang semacam ini, memang banyak dikembangkan di Indonesia oleh orang-orang Belanda seperti Baars, Sneevliet, dll.-nya. Banyak sedikitnya putusan-utusan para pemimpin diwaktu itu, mau tidak mau mestilah terpengaruh oleh teori-teori "Sosialis" atau "Komunis" tadi. Pendek kata" dipandang dari sudut soal revolusi dunia, sikap dan



pendirian pemimpin-pemimpin P.K.I. ditahun 1926/1927 juga berpaham dan bersifat trotskistis. Dengan jalan demikian **kebutuhan nasional dikorbankan kepada internasional, yang tiada pada tempatnya**. Baiklah, ini juga sekarang jelas. Ini kita uraikan sambil lalu saja, agar pembaca bisa lebih mudah memahamkan politiknya pemimpin-pemimpin P.K.I. ala Sardjono sekarang ini, yang **juga mengorbankan kebutuhan nasional kepada kepentingan internasional zonder ada keperluan**.

Apakah lanjutan paham Trotskisme, yang manafsirkan “DIKTATUR PROLETAR” itu sebagai kekuasaan tenaga-tenaga proletaris melulu? Karena Trotskisme tidak mempunyai keyakinan bahwa revolusi sosial mungkin dilaksanakan secara kerjasama dengan kaum tani, maka sudah tentu akibat dan lanjutan teori Trotskistis itu, tidak mempunyai kepercayaan kepada kemungkinan melaksanakan revolusi sosial-proletaris di negeri-negeri agraris, atau di negeri-negeri, dimana kaum proletar belum merupakan golongan-kelas yang terbanyak dan terkuat. Trotskisme mempunyai anggapan, bahwa revolusi sosial-proletaris **hanya** dapat dilaksanakan di negeri-negeri kapitalis, yang terkemuka dan termaju, dimana perindustrian negeri itu sudah meningkat tinggi, sehingga kaum proletar terbanyak dan terkuat.

Di negeri-negeri agraris, jadi juga di negeri-negeri jajahan, dimana kaum tani merupakan golongan yang terbanyak, menurut pendapat atau pandangan Trotskisme, tidak mungkin diselenggarakan revolusi-sosial, setidaknya haruslah mendapat bantuan langsung dan lekas dari kaum proletar internasional, yaitu dengan peletusan revolusi di negeri-negeri industri kapitalis, yang terkemuka dan termaju itu.

Dengan bukti-bukti yang telah kita alami dengan revolusi sosial di Rusia, gampanglah ditunjukkan kekeliruan paham Trotskisme tentang soal-soal ini.

Negeri Rus bukanlah negeri industri-kapitalis yang terkemuka dan termaju. Rusia, suatu negeri agraris, yang malahan terkebelakang sekali. Pada akhirnya peperangan dunia yang pertama itu, bukanlah di Inggris, di Perancis atau pun sekali di Jerman, ada timbul revolusi bahwa di Rusia itulah revolusi itu meletus, mulanya bersifat revolusi borjuis-demokratis, yang disambung dan diakhiri dengan revolusi sosial-proletaris.

Apa sebabnya maka di Rusia timbul revolusi di tahun 1917, dan tidak misalnya di negeri-negeri Eropa-Barat?

Sebab di negeri-negeri kapitalis di Eropa-Barat itu, dimana terdapat banyak tenaga-tenaga proletar industri, kaum imperialis juga memperpusatkan tenaga-tenaga dan kekuasaan mereka. Di pusat-pusat industri-dunia itu pulalah organisasi-organisasi dan jentera-jentera penindas kaum modal lebih sempurna dan lebih kuat tersusunnya, sehingga di sana malahan lebih susah memulai revolusi proletar. Di negeri Rusia dan di negeri-negeri agraris lainnya, dimana untaian rantai imperialisme itu yang paling lemah, gampang meletuskan revolusi, akan tetapi lebih susah mempertahannya, lebih-lebih apabila di negeri-negeri luaran tiada pecah revolusi untuk membantunya, yang lazim dinanti-nantikan itu.

Trotsky dan Trotskisme tidak mempunyai keyakinan, bahwa di Rusia bisa dicapai kemenangan revolusi rakyat, zonder ada pergolakan revolusi-dunia umumnya, dan revolusi negeri-negeri kapitalis yang terkemuka dan termaju khususnya. Waktu di Eropa-Barat tiada ada peletusan revolusi, waktu revolusi-dunia tiada dapat dilaksanakan, sebagai bantuan untuk pergolakan revolusi di Rusia, maka teori Trotskisme, mau tidak mau, menganjurkan **kompromis** saja dengan kaum imperialis, artinya menghentikan revolusi sendiri, sekalipun syarat-syarat obyektif dan subyektif dalam lingkungan nasional sendiri baik sekali, dan kembali kepada suasana sediakala, sampai ada “Revolusi Dunia,” yang dinanti-nantikan itu. Lenin dan Leninisme tidak menghentikan revolusi yang sudah meletus, separoh jalan, bahkan mempergunakan syarat-syarat yang sebaik-baiknya itu untuk meneruskan revolusi itu sampai kepada akhirnya.

Sekarang ternyata bagaimana kesalahan dan keplesetannya teori dan anggapan Trotskisme dalam soal ini.



Pengalaman dengan kejadian-kejadian di Rusia itu, oleh Leninisme selalu dijadikan pedoman dan pelajaran.

Di tahun 1945 meletus revolusi di Indonesia, sebagai akibat dari perang dunia ke II. Maupun dalam lingkungan nasional, maupun dalam pengertian internasional, maka syarat obyektif sekali ini berlainan sekali dengan ditahun 1926/1927. Situasi dan suasana di tahun 1945 selaras dan bertepatan sekali dengan peletusan revolusi itu, sehingga syarat-syarat obyektif dimasa itu memang masak dan baik sekali untuk pergolakan tersebut, dan untuk meneruskannya sampai akhirnya.

Peletusan revolusi ditahun 1945, bertentangan dengan pemberontakan ditahun 1926/1927, memang tidak diprovokasi atau di-forceer oleh paham Trotskisme, tetapi suatu keharusan (*een onvermijdelijke noodzakelijkheid*) yang musti terjadi, sebagai akibat keadaan dimasa dewasa itu. Anggapan setengah orang, bahwa proklamasi di bulan Agustus 1945 itu seolah-olah perbuatan avontuurlijk belaka, perbuatan dari beberapa pemuda-pemuda, yang brangasan, adalah anggapan salah yang hakekatnya bersifat contra-revolusioner. Anggapan dan tuduhan semacam itu yang dilemparkan oleh pemimpin-pemimpin "Sayap Kiri," kepada pemuda kita, berurat kepada kepicikan pengetahuan tentang teori Marxisme-Leninisme, yang tidak dipalsukan itu. Sayang sekali tuduhan-tuduhan semacam itu disembur-semburkan pula oleh orang-orang, yang membusungkan dada sebagai murid-murid dari "Universitas Lenin" di Moskow, suatu sikap dan perbuatan, yang cuma bisa memalukan LENINISME dan DIRI MEREKA SENDIRI. Baiklah, ini tidak akan menjadi soal bagi kita.

Pendek kata: peletusan revolusi di Indonesia ditahun 1945 membuktikan kebenaran dan kejituan teori, yang diajarkan oleh Lenin, yaitu bahwa di zaman IMPERIALISME sekarang ini, revolusi itu akan meletus, dimana untaian rantai-imperialisme itu paling lemah, dan tidak akan otomatis meletus di sana, dimana jumlah kaum proletar kebetulan merupakan bagian yang terbesar, seperti misalnya di Eropa-Barat (di Belanda) atau di Amerika, yaitu di negeri-negeri kapitalis-industri yang terkemuka dan termaju. Ditahun 1945, pada penghabisan peperangan-dunia ke II ini, ternyata jelas, bahwa di Indonesia inilah untaian rantai-imperialisme itu yang terlemah. Kalau tidak demikian, maka tentulah segala rupa "proklamasi" dan "resolusi" akan tinggal menjadi catatan di atas kertas belaka.

Kelemahan untaian rantai-imperialisme di Indonesia ini, adalah suatu syarat dan jaminan yang sebaik-baiknya, untuk meneruskan revolusi tersebut sampai keakhirnya, artinya sampai kepada revolusi sosial-proletaris. Kelemahan untaian-imperialisme di Indonesia ini, bukan saja suatu syarat pembuka jalan, bahkan pula suatu syarat penjamin kemenangan sosialisme di Indonesia ini. Sengaja kita katakan di sini, **penjamin kemenangan sosialis**, dan tidak kita batasi dengan perkataan **penjaminan kemenangan borjuis-kapitalis**. Oleh sebab menurut anggapan Leninisme, sekalipun kita di Indonesia, sebagai jajahan dan negeri agraris-feodal, mesti lebih dahulu mengangkat dan menyelenggarakan revolusi-borjuis-demokratis, artinya revolusi yang bersifat dan berwujud ANTI-IMPERIALIS, akan tetapi ini tidak sekali-sekali mesti berarti atau diartikan, bahwa kemenangan-demokratis-borjuis itu dapat **terjamin, zonder mengadakan jaminan untuk kemenangan sosialis-proletaris**.

Tiap-tiap revolusi di zaman imperialisme sekarang ini, **mestilah ditujukan kepada revolusi-proletaris**.

Apa sebabnya mesti demikian?

Oleh karena imperialisme itu adalah fajar dari revolusi sosial, kata Lenin dalam "kata pengantar" dari bukunya: "Imperialisme." Dengan ini Lenin menerangkan, bahwa di zaman imperialisme itu tidak ada revolusi yang bisa mencapai kemenangan selain dari revolusi sosial.

"Kaum proletar," kata Lenin lebih lanjut di lain tempat, "harus meneruskan pergolakan demokratis sampai kepada akhirnya, dengan jalan mengikat massa dari kaum tani itu kepada mereka, supaya perlawanan dari pihak absolutisme itu dengan kekerasan dapat dihancurkan, dan sifat sangsi-sangsi dari kaum borjuis itu dapat dilemahkan. Kaum proletar harus menyelenggarakan



pergolakan sosialis dengan jalan mengikat massa dari elemen-elemen setengah proletaris itu kepada mereka, supaya dengan kekerasan, perlawanan borjuis itu dapat dihancurkan, dan sifat-sifat sangsi dari kaum tani dan borjuis cilik itu dapat dilemahkan.”

Apakah arti penjelasan Lenin di atas itu?

Penjelasan di atas berarti tidak lain dan tidak bukan, bahwa “Revolusi Nasional” dalam zaman imperialisme sekarang ini, terdiri dari dua “phase,” yaitu phase “borjuis-demokratis” dan phase “proletaris-sosialis.” Kedua-dua phase tersebut harus diselenggarakan oleh kaum proletar, artinya oleh politik revolusioner proletaris. Phase pertama tidak akan menghasilkan kemenangan, kalau phase kedua tidak akan menghasilkan kemenangan. Keterangan ini cukup jelas, dan sudah dibuktikan kebenarannya oleh praktek perjuangan di Rusia. **Inilah yang dikatakan penglihatan dan anggapan Leninisme.**

Marilah kita tinjau lebih dahulu dari patokan Leninisme. Ini kejadian-kejadian politik di Indonesia kita, semenjak meletusnya revolusi ditahun 1945. Betulkah politik dari pemimpin-pemimpin “sosialis” dan “komunis,” yang berkepitangan tangan dalam “Sayap-Kiri” berdasarkan kepada Leninisme? Sebab mereka sangat banyak sekali dan sibuk salin-menyalin buku-buku Marx, Lenin, Stalin, dsb.

Apakah politik mereka itu disendikan kepada “mensyewisme,” “sosial-reformisme” ataupun kepada “trotskisme” dan “links-radicalisme”?

Seperti sudah diuraikan di atas tadi, maka keadaan nasional dan internasional yang konkret sudah menyempatkan peletusan revolusi di Indonesia ini. Keadaan dan syarat-syarat tersebut adalah jaminan kemenangan revolusi sosialis, setidaknya mengandung kemungkinan-kemungkinan untuk mencapai dan mempertahankan kemenangan sosialis itu. Syarat-mutlak yang mesti dipenuhi ialah, bahwa revolusi yang sudah meletus itu harus diteruskan ke-akhirnya. Beginilah mestinya strategi dan taktik Leninisme.

Revolusi ditahun 1945 tidak diteruskan, bahkan sengaja dipatahkan dengan segala macam ocehan dan tipu-muslihat. Bukan saja tidak diteruskan sampai kepada revolusi sosial-proletaris, malahan pun tidak diselenggarakan sampai phase “borjuis-demokratis” selesai. Apa sebabnya orang tidak mau meneruskan revolusi nasional kita kepada akhirnya?

Alasan yang terpenting dimajukan oleh kaum “sosialis” dan “Leninist” ialah: **“situasi dan suasana internasional tidak memungkinkan penerusan pergolakan nasional di Indonesia.** Apakah yang dimaksudkan mereka dengan perkataan “situasi dan suasana internasional” itu?

Paham-paham manakah yang diseludungi dengan “alasan” tersebut? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, harus kita lebih dahulu memisahkan paham-paham ‘mensyewisme’ atau “sosial-reformisme” dari paham lainnya. Politik “mensyewisme” dan “sosial-reformisme,” yang selalu tidak menyetujui revolusi, dan selalu takut kepada aksi-aksi revolusioner, karena mentaati dan berlutut kepada “demokrasi-borjuis,” artinya taat dan berlutut kepada kekuasaan kapitalis, yang di Indonesia ini mau tidak mau merupakan kekuasaan imperialis Belanda, maka sudah tentu dan sudah pada tempatnya mereka lebih suka berkompromi saja, lebih suka berunding dan main tula-ansur dengan kaum imperialis, menurut tipu-dayanya demokrasi borjuis itu. Paham oportusime kanan mempergunakan alasan “situasi dan suasana internasional” untuk menggertak dan menakut-nakuti rakyat yang berjuang dengan kekuasaan dan kekuatan imperialis dunia. Semboyan “demokrasi” ikut mereka gembor-gemborkan, sebagai seruling perayu hati guna menarik perhatian rakyat pekerja dari gelanggang pertempuran senjata ke arah percaturan diplomasi, yang bersifat “sopan-santun” dan “peri-kemanusiaan.” Pemuda-pemuda yang sedang memegangkan bedil dan geranggang di fornt-front, dibujuk dengan kedudukan dibangku sekolah. Semboyan “membangun negara” dan “merampas kedudukan dalam masyarakat” dibisik-bisikan ketelinga para pemuda, yang kurang tegas imannya.

Memang sudah menjadi kelaziman bagi orang-orang “sosialis,” bagi kaum oportunistis-kanan senantiasa memberi konsesi kepada pihak modal, berlutut kepada si penindas, dalam pertempuran



modal dengan buruh, dalam pertentangan antara si penindas dengan yang ditindas. Selain dari sikap-sikap pujangga-pujangga “Internasionale ke II” dimana-mana tempat, inipun dapat dibuktikan juga dengan sifat-sifat dan paham politiknya bung-bung kita, Soetan Sjahrir, Amir Sjarifoeddin, Achmad Soebardjo dll-nya. Baiklah, ini tidak perlu kita persoalkan lagi.

Yang perlu diusut di sini, ialah sikap dari orang-orang “komunis,” yang begitu gemar mendadakan diri sebagai “Leninisten” dan membuta saja kepada “decreet-decreet” pemimpin C.P.N di Belanda itu. “Leninisme” kita di Indonesia itu ternyata ikut serta memadamkan api revolusi kita. Mereka juga menganjurkan politik berkompromi dengan imperialis Belanda, dengan juga memakai alasan “situasi dan suasana internasional.”

Apakah yang dimaksudkan mereka dengan obrolan-obrolan itu? Tidak lain dan tidak bukan, bahwa dilapangan internasional tidak ada pergolakan proletar; tidak ada timbul revolusi sosial yang mereka nanti-nantikan itu. Karena menurut penglihatan mereka tidak ada muncul revolusi sosial di lapangan internasional; yang boleh membantu revolusi di Indonesia ini, maka sudah tentu revolusi kita itu tidak mungkin mendapat kemenangan. Kita, menurut pikiran dan timbangan kaum “Leninisten” ini, tidak akan sanggup mempertahankan revolusi di Indonesia sampai menang. Maka dari sebab itulah kita terpaksa dahulu berkompromi saja dengan kaum imperialis itu dibayangkan-bayangkan sebagai “siasat Leninisme.” Apakah tidak jelas, bahwa politik yang menggantungkan nasib buruh Indonesia kepada keadaan proletar internasional semata-mata, tidak lain dari pada teori dan logika Trotskisme?

Apakah bukan teori Trotsky, yang mengatakan:

“Zonder pertolongan-negara yang langsung (rechtstreekse staatsondersteuning) dari pihak proletar Eropa, maka kaum buruh Rusia tidak akan sanggup tinggal berkuasa dan menjadikan kekuasaan-sementara, yang mereka pegangkan itu diktatur sosialis, yang berlama-lama.”

Seandainya dulu belum tegas bagi kaum proletar revolusioner yang jujur, bahwa yang mendorong pemberontakan 1926/1927 adalah politik yang berpaham Trotskistis, tetapi sekarang sudah tidak dapat disangkal lagi, bahwa yang dijadikan pedoman oleh pemimpin-pemimpin P.K.I. untuk mengerem dan mematahkan revolusi ditahun 1945, adalah paham-paham dan anggapan-anggapan Trotskistis juga. Jadi memanglah bukan suatu “kebetulan melulu,” (*een blinde toeval*) yang tidak mempunyai pengertian, bahwa P.K.I. dimuka tahun 1926/1927 dipimpin oleh seorang yang bernama Sardjono, dan hampir 20 tahun belakangan, yaitu sesudah tahun 1945, P.K.I. itu juga kembali dikendalikan oleh Sardjono cs itu juga.

Sekalipun pendirian Sdr. Sardjono ditahun 1926/1927 berlainan, bahkan pula bertentangan tampaknya dengan perbuatan politik Sdr. Sardjono ditahun 1945, akan tetapi kedua macam corak oportunisme itu dalam hakekatnya berurat-tanggung pada paham-paham Trotskisme itu juga. Jadi tidak heranlah, kalau pimpinan P.K.I. ditahun 1946 membetulkan secara resmi segala kesalahan-kesalahan yang diperbuat dan harus dipertanggung-jawabkan oleh pimpinan P.K.I. ditahun 1926. Baiklah, cuma ini tidak bisa dikatakan suatu “zelfkritiek” dan “zelfcorrectie” yang bersifat bolsyewisis, yang lazim dilakukan dikalangan kaum revolusioner, untuk mempertahankan paham-paham Leninisme dalam kalangan sendiri.

Pada hemat kita, sekarang cukuplah jelas bagi khalayak banyak, siapa sebenarnya yang berpaham “Trotskistis” di Indonesia kita ini. Mungkin sekarang kawan-kawan seperjuangan akan sadar pada kekhilafan mereka, dan akan menarik kesimpulan yang konsekwen dari kesadaran tersebut.

Marilah kita teruskan pengupasan tentang soal Trotskisme itu, supaya lebih jelas dan lebih tegas akan bahaya-bahayanya yang sejati. Dapatkah teori Trotskisme seperti yang di atas tadi kita pertahankan? Dapatkah rakyat Indonesia, yang memperjuangan kemerdekaannya mengikutkan



pemimpin-pemimpin, yang mengatakan: “Rakyat Indonesia tidak boleh meneruskan revolusinya, semata-mata karena dilapangan internasional tidak ada pergolakan revolusi proletar?” Sudah tentu tidak.

Karena sikap ini bertentangan keras dengan teori Leninisme, yang menguraikan secara perilmuan, dan menyelenggarakan secara praktis, bahwa mungkin revolusi proletaris-sosialis itu dilaksanakan dalam suatu negeri, meskipun dengan tidak ada pertolongan dari kaum proletaris di luar negeri secara lantas. Stalin sendiri malahan berkata, bahwa revolusi sosialis itu harus diselesaikan dahulu dalam salah satu negeri, meskipun negara agraris juga terbelakang sekali, dengan atau zonder adanya pertolongan proletar dari luar. Bagaimana pemimpin-pemimpin komunis, seperti Maruto Daroesman, Alimin, Aidit, Soekirman cs. menyesuaikan perbuatan politik mereka dengan teorinya Lenin dan Stalin di atas itu, biarlah “soal istimewa” ini kita pulangkan kepada mereka masing-masingnya. Demokrasi borjuasi itu memang banyak mengandung kemungkinan-kemungkinan untuk mengelabui mata rakyat jelata, kalau hendak dipergunakan.

Kalau kita hanya membuta saja kepada pertolongan internasional, artinya menantikan pergolakan proletaris di negeri-negeri kapitalis yang terkemuka dan termaju itu, maka dalam konsekuensi teori itu terlibat pengertian, bahwa kita tidak perlu lagi menginsyafkan kaum Proletar Indonesia untuk berevolusi, untuk memperjuangkan kemerdekaan sendiri. Kita cuma perlu mengatakan kepada buruh Indonesia, supaya mereka tidur-tiduran saja, setinggi-tingginya berteori-teori-an rrevolusionerrr saja, atau meyorak-nyoraikan semboyan-semboyan Marxisme-Leninisme dan mengusung-usung pigura-pigura Marx, Lenin dan Stalin saja, selama di lapangan internasional umumnya, dan di negeri Belanda khususnya belum ada revolusi proletar.

Apakah bukan paham-paham Trotskisme ini, sekalipun dalam pengertian yang sempit sekali, yang dijadikan patokan dan pedoman dari politiknya kaum “Leninisten,” yang dikirimkan oleh pemerintah Sri Baginda Ratu Wilhelmina Mahkota Raja Belanda ke Indonesia ini, mau pun sebagai opsir-opsir NICA, maupun sebagai duta-duta istimewa untuk melaksanakan politik “damai.”

Di Belanda tidak ada pergolakan apa-apa, kata mereka. Kaum Buruh Belanda, sebab dimaboki dengan lagu-lagu “*personalistisch socialisme*” dari pihaknya Schermerhorn-Drees, sebab diragu pula oleh bunyi seruling dari C.P.N. (“De waarheid”), yang ikut menyanyi-nyanyikan teori tentang “*vreedzame ontwikkeling van het kapitalisme*,” yang ikut sibuk mengemborkan **keharusan membangun demokrasi kapitalis kembali**, ternyata siap-sedia bertolak ke Indonesia sebagai tentara imperialis. Oleh sebab pengiriman soldadu-soldadu itu disetujui dan dipertanggung-jawabkan oleh kaum “sosial—dan komunal—chauvisten” di Belanda itu, maka mereka lantas mengambil kesimpulan: “revolusi Indonesia tidak dapat menang, jadi harus dipatahkan.”

Oleh sebab politik C.P.N. (“De Waarheid”) mementingkan sekali kebutuhan penjaminan “demokrasi” di Indonesia ini oleh tentara imperialis Belanda, dan oleh sebab “Leninisten” kita memang tadinya disusui di Belanda dengan sifat-sifat patuh kepada disiplin C.P.N., maka mau tidak mau, mestilah Leninisten: kita itu, memandang kejadian-kejadian di Belanda itu, sebagai patokan dan pedoman untuk menafsirkan “situasi dan suasana internasional,” yang katanya tidak “mengizinkan” kemenangan revolusi Indonesia. Baginilah kalau kita tidak menganalisis situasi politik dengan secara “zelfstanding.” Beginilah hasilnya kalau kita hanya mentaati disiplin secara mekanis dan schematis saja.

Paham-paham Kautskianisme dari oportunisme-kanan dan paham-paham Trotskisme dari oportunisme kiri, memanglah tidak pernah dibatasi dengan dinding baja. Dari lukah yang pertama itu orang gampang sekali tergelincir masuk lukah yang kedua, dan sebaliknya demikian pula. Baiklah, keterangan ini cukup jelas untuk menunjukkan ideologische “background” dari pemimpin-pemimpin “Leninisten,” yang sekarang sepemondokan di bawah atap “Sayap-Kiri,” sekalipun mereka datang dari berlainan pojok.

Trotskisme memang sekali merupakan bahaya besar dalam kalangan perjuangan-kelas proletaris. Paham-paham Trotskisme, yang sebenarnya, memang sekali perlu dan harus dibasmi



habis-habisan dari kalangan kaum-pekerja umumnya, dan dari kalangan buruh revolusioner khususnya. Pembersihan paham Trotskisme itu, sudah tentu tidak dapat dilaksanakan atau disuruh laksanakan oleh mereka, yang sendiri perpenyakit Trotskisme. Disinilah terletaknya kekacauan politik sekarang ini. Orang-orang yang menurut analisis, yang obyektif-*wetenschappelijk*, ternyata jelas dihindangi penyakit Trotskisme, mereka pulalah yang sekeras-kerasnya menceritakan tuduhan-tuduhan “Trotskisme” terhadap orang lain.

Trotskisme “an sich” saja. Seperti kita katakan di atas tadi, sudah merupakan bahaya besar dalam perjuangan buruh. Sungguhpun demikian, tidak boleh kita katakan, terlepas dari pokok-urainya yang salah, dan akibat-akibat teorinya yang selalu keleset itu, bahwa Trotskisme itu didasarkan kepada anasir-anasir tidak jujur. Akan tetapi bagaimanakah harus kita sebutkan sesuatu perbuatan prognose politik, yang disandarkan kepada sesuatu diagnose yang tak jujur? Lebih jelek dari Trotskisme.

Apabila orang-orang “pseudo-Leninisten” itu mengobrolkan, bahwa “situasi dan suasana internasional” tidak mengizinkan atau memungkinkan penerusan revolusi di Indonesia, serta memandang, bahwa “situasi dan suasana di Belanda” itu adalah “situasi dan suasana internasional,” maka mereka bukan saja membuat kesalahan Trotskistis, bahkan mereka sengaja dan insyaf-penuh mau mendustai dan mengelabui rakyat Indonesia, yang sedang berjuang aktif dimasa dewasa itu.

Karena “situasi dan suasana di Belanda” itu saja, tidak dapat dijadikan patokan dan pedoman untuk mengukur atau menaksir keadaan internasional. Keadaan di Belanda itu belumlah merupakan situasi dan suasana internasional seluruhnya, satu dengan lainnya sangat sekali berbedaan.

Ditahun 1945, disaat meletusnya revolusi Indonesia, memang harus diakui, bahwa keadaan di Belanda ada sedikit tentram, **ada sedikit “aman,”** sekalipun ini akibat dari “siasat” demokrasi-demokrasi dari pihaknya pemimpin-pemimpin C.P.N. (“De Waarheid”) diwaktu itu, yang keleset kearah oportunisme-kanan.

Akan tetapi situasi internasional tidaklah seperti itu. Dimana-mana terjadi pembentokan modal dengan buruh. Polonia sedang melaksanakan revolusi agraria mereka. Yugoslawiya sedang sibuk mengkonsolideer “demokrasi proletaris” dinegerinya, setelah kekuasaan imperialis di Yugoslawiya itu dihancurkan. Di Yunani kaum proletar sedang ramai memperjuangkan kemerdekaan rakyat di bawah pimpinan E.A.H. Di Tayehoslowakiya kaum proletar revolusioner sedang giat melubangi demokrasi borjuis, serta berusaha melepaskan negara dan negeri mereka dari genggaman atau pengaruh ekonomi imperialis asing. Di Ungaria dan Bulgaria kaum proletar repot berjuang merampas kekuasaan borjuis secara mengadakan pemogokan-pemogokan. Di Perancis kaum buruh mati-matian menentang politik reaksi dari De Gaulle. Di Belgia kaum proletar mengusir pemerintah Plerlot dengan tenaga pemogokan umum di Boinage. Di Inggris rakyat pekerja selalu dalam kegelisahan menentang politiknya Erns Bevin Pemogokan-pemogokan besar-besaran dan demonstrasi-demonstrasi raksasa muncul dimana-mana di Inggris itu. Di Italia kekacauan politik dan ekonomi yang maha hebat. Imperialisme Amerika dan Inggris belum sempat mengkonsolideer kedudukannya disana. Di Amerika sendiri ratusan ribu buruh mogok. Ini kekalutan-kekalutan di negeri-negeri Eropa dan Amerika saja baru.

Keadaan-keadaan di negeri-negeri jajahan dan setengah jajahan, seperti misalnya di benua Asia ini, juga tidak lebih baik dari keadaan-keadaan di Eropa dan Amerika itu, sekalipun harus diakui bahwa di negeri-negeri ini sifat-sifat kekalutan itu agak sedikit berlainan, disebabkan oleh syarat-syarat feodal-agraris dari negeri-negeri itu! Disini bukanlah tindakan-tindakan kaum proletaris yang penting diperhatikan, akan tetapi, menurut uraian dan anggapan Stalin-pergerakan kemerdekaan nasional, yang harus dijadikan pedoman. Umumnya negeri-negeri jajahan itu memang sudah selalu berada dalam keadaan, yang revolusioner.

Dalam tulisannya yang berkepalanya: “Lebih baik sedikit, ansal baikan,” Lenin pernah mengatakan, bahwa “benua Timur, sebagai akibat dari peperangan imperialistis yang pertama ini, tercemplung untuk selama-lamanya ke dalam pergerakan revolusioner seluruhnya.”



Jikalau Lenin sendiri telah, mengatakan dahulu sedemikian itu tentang benua Timur ini, yaitu diwaktu sesudah peperangan dunia yang pertama berakhir, maka teranglah bahwa benua Timur ini, sesudah peperangan imperialis yang kedua ini, dalam hakekatnya sudah menjadi kawah revolusi, yang sangat hebat dan mengancam sekali. Perlawanan anti-imperialis, sebagai introduction dari revolusi-dunia, tentu akan timbul dan mesti akan timbul di negeri-negeri Asia ini.

Jadi bukanlah tidak ada artinya teori Leninisme selalu sangat mementingkan pergerakan kemerdekaan nasional di negeri-negeri jajahan di benua Timur itu. Apa sebab demikian?

Pertama sebab disanalah kemungkinan-kemungkinan peletusan revolusi yang lebih besar. Kedua sebab disanalah pula kemungkinan besar untuk melaksanakan dan mencapai kemenangan revolusi, setidaknya-kemungkinan kemenangan revolusi anti-imperialis dahulu.

“Sebab disana itu,” kata Stalin, “yang menghadapi revolusi, adalah lawan yang dikenal dan terkenal bagi segala orang, yaitu imperialis asing, yang berdiri sendirinya, zonder mempunyai sedikit juga kredit moreel, dan juga benci oleh dendam kesumat umum, dari seluruh massa, yang digencet dan diperasnya itu.”

Baiklah, segala apa yang diuraikan dan diramalkan oleh Stalin itu, memang sudah lama dibuktikan oleh kejadian-kejadian sebelum dan sesudahnya peperangan-dunia yang kedua ini.

Seperti sama diketahui, maka pada akhirnya peperangan-dunia yang belakangan ini, boleh dikatakan tidak ada soal yang menakutkan serta menggoncangkan hati kaum imperialis, selain dari soal kemungkinan-kemungkinan meletus dan meluapnya revolusi-revolusi di benua Timur ini. Kegentingan situasi revolusioner di daerah-daerah Asia dan sekitar Pasifik ini, sebetulnya secara obyektif sudah demikian memuncaknya, sehingga cuma menantikan inisiatif subyektif saja. Itulah sebabnya tidak diherankan, kalau imperialis Angelsaksis yang masih morat-marit oleh peperangan yang akhir ini, memperpusatkan segala tenaga kekuatan militer mereka di benua Timur ini, mulai dari tanah-tanah Arab, melalui Asia Selatan dan Asia-Tenggara sampai ke Timur jauh. Juga imperialis Belanda, atas tekanan majikannya imperialis Inggeris, ikut serta mengirinkan tentara-tentara ke Timur ini, yang disetujui dan dibantu oleh pemimpin-pemimpin C.P.N. (“De Waarheid”) ala de Groot dan Wagenaar, dengan beralasan “**mempertahankan “demokrasi” dari gencetan, dan tindakan antek-antek atau boneka-boneka fasis-Jepang, yaitu pemerintah Soekarno-Hatta di Indonesia,**” waktu terbukti, bahwa Nippon sudah bertekut-lutut. Baiklah, juga ini perlu dicatat sambil pendek kata: terlepas dari prog-dan diagnose yang berteoritis dialektika Leninisme, maka situasi obyektif di Timur ini cukup dijelaskan oleh bukti-bukti yang factisch dan praktisch.

Peletusan revolusi di Indonesia, yang lantas disambut oleh pergolakan rakyat di Vietnam, adalah bukti-bukti yang nyata sekali, bagaimana “situasi dan suasana di benua Timur” di akhir peperangan-dunia kedua ini, pada umumnya. Juga kegentingan politik dan ekonomi di India, yang sangat mengancam, adalah pembuktian factisch dari labiliteitnya kedudukan imperialis Inggeris di sana. Belum lagi kita ambil pertarungan hebat di Persia, kekacauan politik disekitar tanah-tanah Arab, dsb.

Peletusan revolusi di Indonesia, yang sudah diikuti oleh revolusi rakyat di Vietnam itu, bukanlah saja berarti suatu bayangan “situasi dan suasana di benua Timur” ini, bahkan dalam hakekatnya dan akibatnya, bisa pula menjadi cetusan api untuk membakar mesiu disekitar lautan Pasifik. Perhatikan lah pidato pembelaan kemerdekaan Indonesia dari saudara Manuilski di dalam D.K. di Inggeris dahulu itu!

Dalam hemat kita, maka tiap-tiap orang yang mengetahui dan berpegang kepada analisis Marxisme-Leninsisme, mestilah bisa melihat analisis dari pergolakan rakyat di benua Timur itu. Tiap-tiap pemimpin mestilah dapat menafsirkan makna-makna, yang terkandung dalam kejadian-kejadian tersebut. Para pelitici kita haruslah dapat mendalami pengertian dan kesimpulan dari peperangan dunia yang kedua ini, mereka haruslah pandai menentukan titik-berat, dan mengirinkan akibat-akibat dari segala kejadian di benua Asia ini. Pengetahuan tentang anasir-anasir tersebut,



kecakapan untuk mempergunakan pengetahuan itu guna keuntungan-perjuangan kemerdekaan nasional Indonesia kita, adalah suatu batu ujian bagi kualitas para pemimpin kita. Kualitas ini rupanya memang belum tahan uji.

Kalau ternyata sekarang, bahwa revolusi Indonesia kita tidak sampai menjadi cetusan api yang meluapkan pembakaran sampai menjadi cetusan api yang meluapkan pembakaran imperialis diseluruh Pasifik, bukanlah ini terletaknya di dalam syarat-syarat obyektif, akan tetapi di dalam kesalahan subyektif.

Langkah yang dilangkahkan oleh pemerintah Soetan Sjahrir ke-arah berkompromi dengan imperialis Inggeris, yang dibeli dengan pengiriman beras berjutaan kilo ke India untuk menolong imperialis Inggeris, yang lagi terjepti, bukanlah saja bermaksud hendak membelokkan revolusi di negeri sendiri, akan tetapi mengakibatkan pemadaman api revolusi yang hendak berkobar di sekitar pasifik ini.

Di dalam lingkaran penjelasan di atas ini, memanglah tidak perlu lagi diuraikan panjang-lebar tentang arti sikap pemerintah-Soetan Sjahrir, yang menyabotase terang-terangan susah payahnya sdr. Manuilski ditahun 1946 dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di muka sidang D.K., karena menganggap revolusi Indonesia itu sangat penting sekali buat kejadian-kejadian di sekitar pasifik.

Dengan keterangan di atas dapatlah dipahamkan, bagaimana sebenarnya situasi dan suasana ditahun 1945, maupun di benua Timur ataupun di Eropa dan Amerika.

Pseudo-Leninisten kita di Indonesia, seperti yang telah kita uraikan berkali-kali, bukan saja berpedoman kepada paham-paham Trotskisme, dan hendak melaksanakan kemerdekaan nasional kita menurut konsepsi dan teori Trotskistis, karena “situasi dan suasana internasional,” yang **dijadikan syarat-mutlak buat mencapai kemerdekaan rakyat Indonesia kita**, itupun dipalsukan pula.

Kira-kira teranglah sekarang bagi para pembaca, bahwa mereka yang bertanggung-jawab atas pembelokan perjuangan-revolusi kita, yang bersifat dan bertujuan ANTI-imperialis itu, ke arah dan kejurusan PRO-imperialis Belanda, bukan saja berpaham atau berpolitik Trotskistis “secara prinsipil,” bahkan adalah tukang-tukang sunggelap-mata, yang sengaja memalsukan segala kenyataan-kenyataan untuk bisa **mempergunakan strategi dan taktik Trotskistis**. Mau tidak mau, akibat dari perbuatan yang sedemikian itu mestilah pengkhianatan kepada perjuangan kemerdekaan rakyat Indonesia sendiri, dan kecurangan terhadap perjuangan-kelas proletar internasional. Kita katakan ini secara obyektif, terlepas dari anggapan subyektif dari mereka itu, yang gemar mendadakan diri sebagai “Leninisten” atau “Stalinisten” istimewa. Baiklah, segala-galanya terserah kepada yang mau memikirkan, dan pembuktian di belakang hari.

Seperti telah kita uraikan di atas, apa menurut tilikan Leninisme titik-berat dalam soal DIKTATOR PROLETAR itu, terletak dalam PERSEKUTUAN atau “VERBOND” yang semacam tadi, maka tentulah kata-kata “Diktatur Proletar” itu cuma tinggal menjadi tuturan bibir belaka, yang tidak mempunyai isi apa-apa. Ini jelas. Akan tetapi kita harus pula mengetahui, bahwa “PERSEKUTUAN,” yang sangat dibutuhkan itu, tidak dapat dan tidak mungkin dapat digalang dengan lidah yang tak bertulang. “Persekutuan” dengan kaum tani itu, haruslah disandarkan kepada kepentingan bersama, kepada kepentingan ekonomi yang sejalan dan selaras.

Dalam “klasse-verbond” yang dikehendaki itu, harus sekali “verbond” tersebut (yang dalam prakteknya merupakan semacam ikatan “Persatuan Perjuangan!”) dipimpin atau digerah-dan digerakkan oleh kaum buruhnya, oleh politik proletaris yang revolusioner. Apa sebabnya? Karena memanglah kelas proletar itu merupakan golongan yang termaju, dan yang paling konsekwen sekali. Dalam “*klasseverbond*” yang dimaksud oleh atau sebagai “Diktatur Proletar” itu, bukanlah tenaga-tenaga tani yang mesti memegang pimpinan, bukanlah tenaga-tenaga pertanian yang mesti menjadi sendi motornya, dengan lain perkataan: bukanlah paham-paham atau anggapan borjuis-cilik yang harus dijadikan pedoman dan patokan. Leninisme, yang menentang Trotskisme,



bukanlah berarti Bucharinisme, yang mengutamakan tenaga-tenaga dan rol kaum tani di dalam pengertian “Diktator Proletar.” Ini harus diperingatkan, supaya kita jangan kepeleset dari suatu lukah kelain perangkap.

Persekutuan, yang dimaksudkan oleh Leninisme, bukanlah suatu “verbond” yang sembarangan saja, yang misalnya bersifat “liberalistik,” karena persekutuan-kelas yang dikehendaki itu, adalah suatu persekutuan dari tenaga-tenaga, yang sama sekali tidak bersamaan kedudukannya, kesanggupannya, dan kewajibannya masing-masing.

“Diktatur proletar itu,” demikianlah kata penjelasan Lenin dalam uraian-uraian beliau, “adalah suatu persekutuan-kelas yang bersifat istimewa “yaitu suatu verbond” antara kelas-kelas, yang dalam pengertian ekonomis, politis, sosial dan kecerdasan wataknya tidak bersamaan. “Lenin dalam Kata Pengantar untuk pidato tentang semboyan-semboyan yang menipu rakyat.”

Apakah sebetulnya arti penjelasan Lenin diatas? Apakah artinya “verbond” antara kelas-kelas yang tidak bersamaan, atau yang tidak bisa sama kedudukan mereka itu? Ini berarti tidak lain dari pada keharusan HEGEMONI PROLETARIS dalam persekutuan itu. Hegemoni proletaris inilah, yang menjadikan persekutuan-kelas antara kaum buruh dengan kaum tani itu suatu persekutuan yang istimewa. Demikian anggapan dan penglihatan politik Leninisme. Baik.

Jikalau kita katakan di atas, bahwa persekutuan-kelas tadi tidak dapat digalang dengan lidah atau air ludah semata-mata, maka sudah tentu HEGEMONI PROLETARIS DALAM “verbond” yang dimaksudkan itu, sama sekali tidak dapat dan tidak akan mungkin dapat didudukkan dengan obrolan kosong saja. Juga dengan kekuatan senjata menghadapi kaum tani itu bukanlah berarti suatu jaminan, yang hegemoni proletaris dalam persekutuan tadi akan diakui, ditaati, dihormati dan diyakinkan oleh kaum tani. Di negeri agraris seperti di Indonesia ini, dimana jumlah dan kekuatan tenaga proletar masih jauh terbelakang, bila dibandingkan dengan tenaga-tenaga a-proletaris umumnya, maka tiap-tiap usaha untuk memaksakan hegemoni proletaris kepada kaum tani dengan pertolongan kekuatan senjata, maka tidak boleh tidak akan menimbulkan perlawanan yang sengit dan mungkin akan tidak bisa berhasil.

Bagaimana kita mesti menggalang persekutuan-kelas yang istimewa itu? Bagaimana Leninisme mesti menyelenggarakan soal hegemoni proletar dalam persekutuan-kelas itu? Supaya kaum buruh dapat menggalang dan mempertahankan persekutuan-kelas, yang semacam diterangkan di atas tadi, supaya kaum buruh dapat menjadi pemimpin **dari** dan **di dalam** persekutuan dengan kaum tani itu, supaya tampak oleh kaum tani, sehingga dipercayalah bahwa benar-benarlah kaum proletar itu merupakan kelas yang termaju dan yang paling konsekwen sekali dalam perjuangan anti-kapitalis itu, maka hendaklah kaum buruh menunjukkan kepada kaum tani dengan perbuatan yang tegas, yang tiada bersifat sangsi-sangsi, **akan kesanggupan kaum proletar untuk memperbaiki nasib hidup si kaum tani itu.** Sekurang-kurangnya membukakan kemungkinan-kemungkinan untuk memperbaiki nasib hidup si kaum tani. **Inilah jalannya kaum proletar merampas dan mendudukkan hegemoni proletaris** dalam persekutuan-kelas itu.

Politik realisme memang tidak bisa percaya kepada angan-angan yang mengharapakan, bahwa kaum tani itu dapat dipikat dan diikat dengan gula-gula ocehan saja, sekalipun dengan obrolan tentang “Marxisme,” “Leninisme,” “Stalinisme,” “omong-gardu-isme” atau “isme-isme” lainnya.

Supaya hegemoni proletaris itu bisa dihormati dan diyakini oleh kaum tani umumnya, maka harus sekali kaum proletar jangan takut berkorban bila perlu, untuk membela kepentingan kaum tani itu secara sungguh-sungguh.

Apa sebabnya, maka kaum proletar jangan takut berkorban untuk membela dan mempertahankan kepentingan kaum tani? Karena “prinsip yang tertinggi dari Diktatur Proletar itu, ialah mempertahankan persekutuan kaum proletar dengan kaum tani, supaya kaum proletar dapat



memegangkan rol pimpinan dan kekuasaan negara,” kata Lenin. Lenin dalam pidatonya: dalam sidang Kongres ke III dari Komintern.

Di sini teranglah, bahwa yang menjadi inti dari Leninisme, ialah persekutuan antara tenaga proletar dengan tenaga pertanian. Jadi teranglah pula, bahwa yang menjadi inti aktivitas dari politik revolusioner, ialah **usaha dan ikhtiar** untuk menyelenggarakan verbond tersebut. Dengan patokan ini dapatlah kita menguji perbuatan bonggolan-bonggolan “Leninisme” di Indonesia ini. Baiklah, ini cukup jelas.

Bagaimana sekarang dengan paham Trotskisme?

Trotskisme tidak mengakui keperluan atau keharusan “*klasse-verbond*” di atas. Jadi logis dan sudah pada tempatnya politik Trotskisme **tidak mementingkan usaha** untuk menempa dan mempertahankan persekutuan-kelas antara kaum proletar dengan kaum tani itu. Malahan sebaliknya dari pada itu. Politik “radikalisme” dari paham Trotskistis itu tempo-tempo malahan terpaksa meyaboteer penggalangan persekutuan-kelas yang dibebaskan di atas tadi, terpaksa menentang keras segala usaha dan ikhtiar yang ditujukan ke arah penyelenggaraan persekutuan yang sangat dibutuhkan itu.

Dengan menyabotase dan menentang persekutuan-kelas, yang menjadi syarat-mutlak dari “Diktatur Proletar” itu, maka dalam hakekatnya Trotskisme menyabotase dan menentang “Diktatur Proletar” secara praktis. Dengan menentang dan menyabotase penyelenggaraan praktis dan “Diktatur Proletar” itu, yang sanggup melaksanakan revolusi proletaris-sosialis sampai kepada kesudahannya, maka orang dalam hakekatnya tidak mau menjalankan revolusi proletar-sosialis, yang bisa memerdekakan rakyat pekerja sepenuh-penuhnya.

Demikianlah duduknya secara-teoritis soal Trotskisme itu. Marilah sekarang kita uji perbuatan politik dari pemimpin-pemimpin revolusioner Indonesia itu, yang mengendalikan “Sayap-Kiri.” Adakah pujangga-pujangga “Leninisme” kita menyelenggarakan siasat persekutuan-kelas, yang begitu dipentingkan oleh teori-teori Leninisme”?

Marilah kita periksa jawaban pertanyaan di atas secara *wetenschappelijke objectiviteit*, terlepas dari pandangan subyektif terhadap mereka masing-masingnya.

Sebagai sama diketahui, maka Indonesia ini adalah suatu negeri agraris. Tetapi jangan dilupakan, bahwa agraria Indonesia itu, dalam pengertian ekonomis, tidak masih tetap tinggal dalam tingkatan yang di bawah, tingkatan yang primitif seperti sediakala. Sekalipun kita akui, bahwa secara teknis produksi agraria itu masih banyak dikerjakan secara yang primitif. Kedudukan “*cultur ondernemingen*” Belanda di Indonesia ini, yang menghasilkan produksi untuk export-dunia, cukup menunjukkan, bahwa ekonomi Indonesia kita sudah lama meningkat ketinggian agraria-industri.

Dengan kenyataan ini, maka mudahlah dipahamkan, bahwa yang mengungkung, mengendalikan dan mengontroler ekonomi pertanian kita, adalah paberik-paberik, onderneming-onderneming, perusahaan-perusahaan besar dari imperialis Belanda, dan imperialis asing. Nasib hidup dari kaum tani di daerah “Kerajaan Solo” misalnya, tidak ditentukan oleh kemauan “Kanjeng Susuhan” seperti di zaman dahulu, akan tetapi oleh politik-laba (“*winst-politiek*”) dari “*Indische Suiker-syndicaat*,” yang mempunyai paberik-paberik gula di Jawa umumnya, dan di daerah Solo khususnya.

Dengan contoh ini saja, jelaslah kepada siapa yang mau berpikir, bahwa nasib rakyat pertanian kita, sekalipun masih mempunyai suasana feodalistis disana-sini, dalam hakekat dan prakteknya tergantung sangat kepada “*agrarische industrie*” yang ada di Indonesia ini. Kunci-kunci ekonomi rakyat itu, yang sangat menguasai produksi proses dari pertanian di Indonesia kita, hampir seluruhnya dimiliki oleh imperialis asing, dan oleh imperialis Belanda khususnya. Produksi pertanian rakyat yang terlepas dari kungkungan “modal-modal momopoli” Belanda di Indonesia ini (Suikersyndicaat, concern-concern teh, tembakau, getah, monopoli kina, timah, pelayaran, dsb.) hampir tidak ada, atau tidak mempunyai arti penting.



Dengan kenyataan-kenyataan di atas, yang tidak dapat ditolak itu, maka mestilah satu kesimpulan yang harus diambil dari keadaan-keadaan dan anasir-anasir tersebut, yaitu bahwa nasib hidup kaum tani itu tidak dapat diperbaiki, kalau jentera-jentera-produksi, sumber-sumber ekonomi, atau kunci-kunci dan tempuk-tempuk penghasilan masyarakat, yang menguasai dan mengendalikan kehidupan kaum tani di pelosok-pelosok desa itu, tidak dirampas dari tangan kaum imperialis Belanda.

Kita tidak mungkin dapat mempertinggi produksi pertanian, jikalau agraria kita tidak lebih dahulu dilepaskan dari gengaman penindasan dan pemerasan kaum imperialis, yang dilakukan mereka dengan perantaraan jentera-jentera produksi mereka itu. Tidak bisa tuntutan-tuntutan perbaikan hidup dari pihak kaum tani dipenuhi, tidak bisa nasib kaum pekerja umumnya di Indonesia diperbaiki, dan dilonggarkan, jikalau jentera-jentera produksi itu tidak kita miliki, tidak kita jadikan pokok dan pangkalan untuk menyusun, mengatur dan mempertinggi tingkatan pertanian Indonesia. Merampas segala harta-milik imperialis asing, yang menjadi dan mesti menjadi musuh kita, akan dijadikan milik-kolektif, atau milik-sosialis, adalah sarat-mutlak untuk meringankan beban kaum tani, untuk memperbaiki nasib materil dan moril si kaum tani, dan untuk membukakan kemungkinan-kemungkinan yang luas untuk menyelenggarakan pertanian yang modern.

Merampas dan memiliki jentera-jentera produksi kaum imperialis di Indonesia ini, adalah berarti menyediakan basis materil (*materiele grondslag*) untuk menggalang persekutuan proletar dengan tani. Dengan pensitaan paberik-paberik, onderneming-onderneming, perusahaan-perusahaan besar, tambang-tambang, dan sumber-sumber kekayaan lainnya itu, perusahaan-perusahaan besar, tambang-tambang, dan sumber-sumber kekayaan lainnya itu, dapatlah kaum proletar menunjukkan kepada kaum tani akan kesanggupannya untuk menolong, dan memperjuangkan kepentingan kaum tani. Perampasan dan pensitaan harta milik musuh ini, yakni kunci kemakmuran dari rakyat Indonesia, hendaklah diselenggarakan oleh kaum proletar segiat-giatnya, dibela dengan sehabis-habis tenaga, karena memiliki dan menguasai kunci-kunci produksi agraria kita itu, adalah syarat utama untuk menarik hati kaum tani mentaati, menghormati dan menyayangi "hegemoni proletar" dalam soal persekutuan-kelas itu. Untuk bisa merampas dan memiliki harta milik musuh itu, haruslah kaum proletar mengerahkan segala tenaganya, mempergunakan segala macam dan corak perjuangan-kelas, yang sesengit-sengitnya.

Karena zonder memiliki dan menguasai jentera-jentera produksi yang begitu pentingnya buat produksi agraris di Indonesia, maka sudah tentu segala tuntutan-tuntutan untuk keperluan kaum tani yang banyak dikemukakan oleh pemimpin kita sekarang ini, akan tinggal menjadi tuntutan saja, ibarat suatu jeritan ditengah pada pasir Sahara. Ini nanti akan dibuktikan oleh kenyataan-kenyataan yang sebat.

Begitulah sikap dan siasat Leninisme secara konkret dalam soal hak-milik di Indonesia ini.

Tetapi bagaimana sikap benggolan-benggolan P.K.I.? Apakah dilaksanakan oleh kaum "moderne Leninisme" di Indonesia dari beberapa jurusan?

Pahlawan-pahlawan "Marxisme-Leninisme," yang lebih gemar mengusung-usung dan mengarak-arak pigura-pigura dan bendera-bendera Karl Marx atau N. Lenin, daripada mempelajari siasat dan taktik Leninisme yang sebenar-benarnya, bukanlah saja mereka mempertahankan hidup-mati politik "berkompromi" dengan Belanda, (yang barangkali, atas syarat-syarat yang menguntungkan proletar Indonesia, mungkin juga bisa diterima sebagai siasat Leninisme), bahkan mereka terang-terangan menjadi hulubalang-hulubalang, dan pembela-pembela dari politik "pengembalian harta-milik asing," artinya "Harta-Milik" imperialis Belanda, seperti yang termaktub dalam Naskah Linggajati itu.

Apakah yang terkandung dalam politik pengembalian harta-milik asing itu?

1. Memperkuat imperialis Belanda kembali di Indonesia.
2. Melemparkan kemungkinan untuk memulai pembangunan ekonomi sosialis di negeri sendiri.



3. Menutup kemungkinan-kemungkinan untuk memperbaiki pertanian dan memperbaiki nasib kaum tani.
4. Menyabotase persekutuan kaum tani dan proletar.
5. Membuang kesempatan untuk mempersiapkan “*materiel grondslag*,” guna menggalang “persekutuan kelas” dengan perbuatan yang konkret.
6. Melepaskan syarat “hegemoni proletar” dalam perjuangan anti-imperialis di Indonesia.
7. Menghambat timbulnya “Diktatur Proletar,” yang bisa tumbuh dari “persekutuan-kelas” antara kaum proletar dan kaum tani itu.
8. Mengisolir tenaga-tenaga proletar dari kaum pekerja lainnya, dan memaksa kaum tani dan kaum borjuis-kecil lainnya, meninggalkan front proletar, karena dilihatnya bahwa kaum proletar tidak mempunyai kesanggupan ekonomi untuk menolong mereka.

Dsb., dsb.-nya, yang boleh kita teruskan berpanjang-panjang. Pendek kata: “Siasat” mengembalikan harta-milik asing itu, terang sekali berdasar atas paham-paham Trotskisme, yang terpendam. Artinya paham-paham yang dari semua tidak mementingkan dan tidak mau berikhtiar melaksanakan penggalangan “persekutuan-kelas,” yang begitu diutamakan oleh strategi dan taktik Leninisme.

Barangkali sekarang sudah tidak begitu ajaib lagi bagi para pembaca, apa sebabnya pemimpin-pemimpin P.K.I. seperti Sardjono Maruto Darusmen, Sakirman, Amir Syarifoeeddin, Setiadjit, Alimin, Abdul Madjid cs., sibuk sekali menganjurkan supaya kaum proletar menerima “Naskah Linggajati,” apa sebab seroang “Stalinist” seperti Sardjono pernah mengajarkan teori-teori “PERSATUAN, YANG TIDAK BOLEH DIPECAH-PECAH” (“*Ondeelbare Eenheid*”) zonder menghiraukan soal “*hegemonie proletar* dalam Persatuan” itu.

Barangkali sekarang juga sudah agak jelas bagi para pembaca, apa sebabnya benggolan-benggolan Trotskisme yang mengendalikan SOBSI menganjurkan, supaya jangan ada perlawanan buruh yang sengit dalam soal pengembalian harta-milik asing itu kepada musuh, jangan mengadakan tindakan-tindakan, yang bisa membahayakan “timbang-terima” dari harta-milik asing, yang sudah dirampas dan diduduki oleh kaum proletar dalam revolusi Indonesia itu.

Barangkali sekarang jelaslah bagi khalayak banyak, apa sebab kaum Trotskisten sejati menghancurkan “PERSATUAN PERJUANGAN” yang mungkin bisa menjadi bibit “Diktatur Proletar” di Indonesia ini, semata-mata karena mereka dari semula tidak percaya kepada kepada kemungkinan kemenangan revolusi Indonesia, dan dari semula tidak ada bermaksud akan meneruskan revolusi kita menurut syarat-syaratnya.

Demikianlah duduk-duduknya soal-soal Trotskisme dan Leninisme yang sebenarnya. Orang-orang yang paling gemar mempermainkan tuduhan-tuduhan “Trotskisme” terhadap kawan seperjuangan, bukanlah saja pujangga-pujangga Leninisme, yang mendapat “kursus-kursus ilegal” dari Van Der Plas dan antek-anteknya, malahan pula, inilah yang sangat mengagumkan kita, juga “teoritikus,” yang katanya sudah mereguk air sungai Moskow, bahkan orang yang katanya mendapat pelajaran-istimewa dari Stalin “Himselve,” dan dari Mao Tse Tung sendiri. Baiklah, inipun akan kita catat buat sejarah.

Sebagai penutup risalah kita ini, merilah kita uraian sedikit tentang tuduhan-tuduhan, yang dilemparkan kian-kemari oleh kaum Leninisten” Indonesia itu, seolah-olah orang-orang yang tiada mau berkompromi itu adalah orang-orang Trotskisten, yang mau berevolusi terus-menerus saja, yang tiada mengenal siasat “*adempauze*.”

Leninisme, kata mereka, menghendaki “*adempauze-adempauze*,” menghendaki supaya revolusi itu diselenggarakan “Etappe peretappe,” dari satu phase ke lain phase. Mula-mula melaksanakan phase “demokratis borjuis,” sesudah itu barulah menyelenggarakan phase “proletaris-sosialis.” Yang tiada mau berkompromi dengan Belanda, dengan imperialis asing, dituduh sebagai “permanentiei,” sebagai antek-anteknya Trotskisme.



Uraian di atas memang tidak ada salahnya. Cuma-cuma (mungkin: hanya saja-ed.) kita tidak mengetahui, siapakah yang mau “berevolusi terus menerus” itu, siapakah yang ditahun 1945 itu mau sekali gus melakukan revolusi proletaris-sosialis. Mungkin ada beberapa orang dari P.K.I.—Mr. Joesoef yang didirikan di Cirebon itu, mempunyai cita-cita dan siasat, yang sedemikian. Baiklah, kalau begitu. Akan tetapi dalam peredaran politik seterusnya paham-paham yang sedemikian ini, tidak berarti apa-apa.

Orang-orang dari “Persatuan Perjuangan” tidak dapat dituduh berpaham seperti itu. Program politik Persatuan Perjuangan sekali-sekali bukan suatu program-politik sosialis, dan siasat dari politik Persatuan Perjuangan memanglah didasarkan kepada kebutuhan melaksanakan revolusi kita itu “etappe per etappe.” Sekiranya politik Persatuan Perjuangan di masa itu, 100% sosialis, dan membuta saja kepada kepentingan proletaris, seperti yang mungkin dikehendaki oleh paham Trotskisme, maka sudah tentu program dari Persatuan Perjuangan itu tidak mungkin bisa disetujui oleh lapisan-lapisan dan golongan a-proletaris yang terbanyak itu. Program-politik dari Persatuan Perjuangan di waktu itu adalah program, yang tepat dan jitu, suatu program kewajiban, yang bersifat anti-imperialis dan selaras dengan keadaan serta tingkatan semangat revolusi disaatnya. Jadi memang tidak atau belum bersifat anti-kapitalis.

Dengan kenyataan ini, maka teranglah bahwa PERSATUAN PERJUANGAN dalam prinsipnya memikirkan kemungkinan “*adempauze*,” dan bermaksud hendak menyelenggarakan phase “demokratis borjuis” lebih dahulu. Juga politik dari PERSATUAN PERJUANGAN tidak menolak segala macam “kompromi,” Persatuan Perjuangan cuma menolak tiap-tiap “Kompromi,” yang tidak memberi jaminan atas pengakuan kedaulatan penuh, de facto dan de jure, dari negara dan rakyat Indonesia. Pendek kata boleh dibilang, bahwa wujud politiknya “Persatuan Perjuangan” hanya hendak memperjuangkan dan mempertahankan Isi-minimum dari tugas-kewajibannya revolusi “demokratis borjuis,” yang mestilah bersifat ANTI-IMPERIALIS. “Persatuan Perjuangan” memanglah menjalankan siasat Leninisme. Secara *objektipitet wetenschappelijk*, maka tidak ada suatu alasan pun, untuk memaki-maki “Persatuan-Perjuangan” itu berpaham, atau menjalankan politik Trotskistis.

Sekarang timbul pertanyaan: “Apakah maksudnya siasat kaum “pseudo-Leninisten” memaki-maki Persatuan Perjuangan itu bersifat Trotskistis? Tidak lain dan tidak bukan, supaya politik bertekuk-lutut, yang hendak diselenggarakan mereka, politik memperkuat posisi imperialis Belanda di Indonesia kembali, yang ditutupi dengan tabir-tabir ocehan tentang “demokrasi progresif,” tentang “*Vrijwillige samenwerking* Belanda-Indonesia,” boleh dilihat kaum pekerja. Indonesia atau setidak-tidaknya boleh ditontonkan kepada mereka sebagai “*adempauze*,” yang dimaksudkan secara Leninistis.

Dalam praktek politik kaum “moderne Leninisten” kita, maka “*adempauze*” yang akan digunakan sebagai “waktu peralihan” itu, diangan-angankan lama-lama. Mungkin ada pula yang memikirkan berangkali selama jarak waktu antara “revolusi borjuis” di Perancis dengan “revolusi proletaris” di Rusia. Kalau tidak sekurang-kurangnya selama yang dikehendaki imperialis Belanda, yang sudah lebih dahulu dimasukkan ke Indonesia kita ini, sekalipun untuk “sementara waktu” katanya.

“*Adempauze*” guna “waktu peralihan,” kata mereka. Baik.

Akan tetapi “waktu peralihan” itu, hanya bisa menjadi betul-betul “waktu peralihan,” kalau dalam waktu tersebut, pimpinan revolusi dipegang oleh kaum proletar, yaitu kelas yang paling revolusioner dan paling konsekwen. Jadi jelaslah, bahwa prinsip dari “hegemoni proletar” dalam segala phase revolusi itu tidak boleh ditinggalkan. Akan tetapi kaum opportunist giat membisik-bisikan ke telinga rakyat hanya wajib melaksanakan revolusi demokratis-borjuis saja dahulu.

Nanti, kalau phase ini selesai barulah kita mengangkat revolusi sosial-proletaris.

Selama kita harus melaksanakan revolusi demokratis ini, maka pimpinan perjuangan itu, kita serahkan saja ke tangan borjuis-cilik, kata mereka. Kaum buruh dikerahkan untuk bersatu mentaati



pimpinan borjuis, zonder memperhatikan apakah mereka menjalankan perjuangan anti-imperialis atau tidak. Dengan ocehan, bahwa revolusi demokratis-borjuis, hendaklah dan haruslah dipimpin oleh kaum borjuis sendiri, maka dapatlah kaum buruh itu ditenangkan, dapatlah semangat perjuangan proletar itu ditidurkan. Kaum proletar, yang mempunyai rol memimpin dalam segala phase revolusi sekarang ini, dengan teori borjuistis di atas, diturunkan menjadi golongan yang dipimpin, setinggi-tingginya menjadi golongan yang mempunyai rol pembantu dan menyokong saja. Beginilah politik yang dilaksanakan oleh pemimpin-pemimpin P.K.I. Sardjono cs. Kaum proletar dipasifkan, perjuangan-kelas ditinggalkan.

Sebetulnya tidak guna diuraikan lagi, bahwa kaum borjuis itu tidak mempunyai kesanggupan untuk memimpin dan menyelenggarakan revolusi, sekalipun revolusi demokratis-borjuis. Bukan saja sejarah perjuangan kemerdekaan, yang sudah membuktikan kenyataan ini, bahkan juga revolusi Indonesia sendiri akan membuktikan kebenaran prognose ini. Naskah “Linggajati” adalah suatu tanda-bukti, bahwa kaum borjuis dan borjuis-cilik Indonesia tidak sanggup mempertahankan cita-cita dari revolusi demokratis-borjuis itu.

Menyerahkan pimpinan revolusi demokratis ke tangan kaum borjuis, berarti mempunyai keyakinan, bahwa antara kedua phase revolusi itu mestilah ada “zaman peralihan,” yang lama, dimana buruh itu barulah menggalang tenaga-tenaga mereka. Menyerahkan pimpinan kepada kaum borjuis dalam revolusi demokratis itu, berarti sebetulnya tidak menghendaki “waktu peralihan,” yang sejati, artinya beralih dari susunan dan suasana kapitalisme ke susunan dan suasana sosialisme. Apa sebabnya? Oleh karena tidak ada kaum borjuis yang mau bersuka-rela melangkah ke kakinya ke masyarakat sosialisme. Mereka mempergunakan “waktu peralihan” itu, semata-mata untuk memperkuat kapitalisme dan imperialisme. Ini perlu di peringatkan kepada pemimpin-pemimpin P.K.I., dan kepada “Lininisten” lainnya itu, yang menjadi penyembah-penyembah berhala “persatuan” borjuistis di Indonesia ini.

Kaum opportunistis, yang menanamkan passiviteit dikalangan perjuangan buruh, menyerahkan pimpinan revolusi kita ke tangan borjuis-cilik, karena mereka menganggap seolah-olah antara kedua phase revolusi itu terdapat dinding waja, yang tertentu, yang harus dirombak dalam waktu berpuluh tahun, paham yang sedemikian tidak bersangkutan paut dengan Leninisme, ya, malahan bertentangan dengan pandangan Leninisme. Teori-teori yang semacam itu adalah teori mekanisme yang akibatnya memalsukan Leninisme dengan sengaja.

Betul sekali Leninisme mengajarkan, bahwa di negeri-negeri jajahan seperti di Indoensia ini, yang memang masih bersifat feodal-agraris, orang harus mengangkat dan melaksanakan revolusi demokratis borjuis dahulu, kemudian barulah phase proletaris sosialis. Akan tetapi ini tidak berarti, atau bisa diartikan bahwa phase tersebut, mesti dibatasi tajam-tajam, mesti dipisahkan jauh-jauh, ataupun mesti ditemboki dengan dinding waja yang tebal-tebal. Lenin sendiri menganggap kedua phase itu sebagai dua rentetan untaian dari rantai yang satu.

“Di zaman imperialisme sekarang ini,” demikianlah Stalin menjelaskan, “yang padat dengan pertarungan dan peperangan, di dalam saat dan suasana” fajarnya revolusi sosialis,” di waktu kapitalisme yang tadinya “riap-subur” sudah berbalik menjadi kapitalisme yang “hancur” itu, maka rasanya hampir tidak perlu dibuktikan lagi, bahwa revolusi demokratis-borjuis itu akan harus ditelapaki oleh revolusi sosialis-proletaris, dan bahwa phase yang pertama itu akan tumbuh-terus menjadi phase kedua.”

Theses dan penjelasan Stalin di atas memang sudah dibuktikan oleh proses revolusi di Rusia, yang dimulai sebagai revolusi demokratis-borjuis, yang lantas dinunuti sertapun juga disudahi oleh revolusi sosialis-proletaris. Kedua phase revolusi itu bereretan, berjabatan-tangan, bersangkutan-paut dan bertali-tali turut-menurut. Kedua phase itu adalah senyawa-sejalan dalam prakteknya, yang tidak dibatasi dengan garis atau waktu yang tertentu.

“Mencoba berpandai-pandai mendirikan sebuah “tembok Cina” (*een Chinese muur*) diantara kedua phase itu,” kata Lenin, “mencoba memisahkan kedua phase itu satu sama lainnya, dengan



cara lain, selain dari pada caranya persediaan kaum proletar dan caranya mereka bersekutu dengan Marxisme yang sebesar-besarnya, suatu penghambaran dan penukaran Marxisme itu dengan liberalisme.”

Beginilah duduknya soal revolusi demokratis-borjuis dan revolusi sosial-proletar itu menurut Lenin dan Stalin sendiri. Tetapi “Leninisten” dan “Stalinisten” Indonesia yang istimewa itu menyusun dan menjabarkan “teori baru.”

Kaum proletar Indonesia, demikianlah bunyi ajaran-ajaran mereka dalam kursus-kursus, “Marx-house,” dan medan percelotehan lainnya, **hanya wajib membantu** menyelenggarakan revolusi demokratis saja dahulu. Sudah itu kita mengadakan “waktu peralihan” beberapa lamanya. “Waktu peralihan” ini kita namakan “demokrasi progressief.” Ini diocehkan sewaktu tenaga revolusi kita kuat, selagi rakyat memegang senjata di tangan, yang dipimpin oleh Pemerintah “Sayap Kiri.”

Dalam suasana “demokrasi progressief” itu, kaum buruh Indonesia akan sibuk ikut membangun dan memperkuat kapitalisme di Indonesia ini. Imperialis asing akan membantu kita; Indoensia akan dibanjiri dahulu dengan mesin-mesin pabrik-pabrik modern; Indonesia akan menjadi negeri industri yang modern katanya. Jadinya: perlu sekali “Naskah Linggajati,” kata Pak Alimin. Kita pulangkan saja dahulu segala harta-milik asing itu kepada yang punya. Bahkan kalau seandainya perlu, kita beli kembali dari imperialis itu dengan harga, 75%, 80%, 90%, ataupun 100% dan lebih, bunyi anjuran Pak Alimin.

Darimana datangnya uang pembeli itu, tidak perlu dihiraukan, tidak perlu dijadikan soal. Bung Amir dan Setiadjudj mengharapkan dari Belanda via Van der Plas dan Schermerhorn. Bung Sjahrir dan Mr. Roem mungkin menantikan emas dari Inggeris dengan pertolongan Sir Clark Kerr, Mountbatten, ataupun Lord Killern Dr. A.K. Gani, Mr. Ali cs. sudah main gerlip-gerlip-an mata dengan raja-jara dollar Amerika. Apakah Pak Alimin sudah menyimpang “*cheque*” dari berjutaan rubel di kantornya, yang juga menyetujui pengembalian segala harta-milik asing itu kepada yang punya, agar beliau terlepas dari tuduhan “*collaborateur-Jepang*,” sudah mulai menghitung “*wiskundige reeks*” kembali, cara bagaimana belasting negara itu kelak dapat ditekan ke pundak rakyat Jelata itu, secara yang seefektif-efektifnya, secara yang memuaskan hati bung Hatta sebagai pemimpin Negara dan hati kaum imperialis, yang menagih bagiannya kelak. Ini sudah tepat demikian, karena mereka bukan orang-orang komunis, tidak mendadakan diri sebagai “Lininis.”

Baiklah, ini soal sambil lalu saja, untuk menerangkans ifat-sifat dan kemungkinan-kemungkinan “waktu peralihan” ini, sesudah kita terlepas dari “tekanan dan tindasan feodal sekarang” (bukan imperialis yang mengencet, menindas, dan memeras kita), demikianlah paparan teori mereka, barulah kita mengadakan dan menyusun perlawanan-kelas yang hebat. Sebab dengan kita menolong membangun industri-industri imperialis di Indonesia, kita memperbanyak jumlah kaum proletar industri, yang akan melaksanakan dan memperjuangkan revolusi sosialis proletaris.

Pendek kata: revolusi demokratis itu adalah soal dan hal ikhwal kaum borjuis belaka; revolusi sosialis, yang mesti diangkat oleh kaum proletar saja, adalah atau barulah menjadi soal dan urusan kaum proletar. Jadinya kaum buruh Indonesia **harus menunggu dahulu** dengan pelaksanaan cita-cita dan tuntutan sosialis, sampai negeri Indonesia di industrialiseer, sampai negeri Indonesia menjadi negeri kapitalis yang modern, yang “paling terkemuka dan termaju.”

Apa masih perlukan diterangkan berulang-ulang, bahwa “teori” kaum “sosialisten” dan “komunisten” yang seperti di atas itu tidak lain dari teori Trotskisme? Apa masih perlukan dijelaskan di sini, bahwa “teori” dari kaum kapitulanten di atas, adalah anggapan yang berpaham Trotskistis, atau berurat-berakar dalam paham-paham Trotskisme? Sudah tentu tidak perlu lagi.

Perlukan dikatakan di sini, bahwa “teori” yang digambarkan oleh “Leninisten” di Indonesia seperti di atas tadi, tidak lain dari pada “pemalsuan Leninisme,” teori yang bertentangan keras dengan siasat Leninisme sejati? Tentu tidak. Apakah sebabnya maka kedua phase dari revolusi di Rusia itu bisa diselenggarakan berturut-turunan, zonder ada “chinese muur” yang membatasinya?



Apa sebab “*adampauze*” dalam perjuangan revolusi di Rusia itu, terjatuhnya di dalam lingkungan dan suasananya “Diktator Proletar,” dan tidak seperti di Indonesia kita sekarang, dimana “waktu peralihan” itu terpegang oleh “Diktatur Imperialis” yang diwakili oleh “diktaat-diktaat-nya” Van Mook-Beel-Schermerhorn cs.

Segala ini biasa berlaku, oleh sebab di Rusia dahulu itu, kaum proletar aktif memperjuangkan dan memimpin revolusi demokratis-borjuis, oleh sebab kaum bolsyewik, yang memimpin perjuangan proletar Rus tidak beranggapan, bahwa revolusi borjuis itu semata-mata soal dan urusan kaum borjuis sendiri, dimana kaum proletar mempunyai rol “membantu” saja dimana kaum buurh harus “bersatu saja” di belakang pemerintah “Karensky” misalnya, yang lagi berkompormi dengan imperialis asing.

Segala-gala itu dapat diselenggarakan secara sedemikian itu, oleh karena rakyat Rus tidak dipimpin oleh partai-partai oportunisme, oleh paham-paham Kautskianisme atau paham Trotskisme, tetapi oleh suatu partai proletaris revolusioner, suatu partai bolshevik, yang sesungguhnya, yang dipimpin oleh kaum Leninisten sejati, yang tidak mau diperbudak, diperkudakan, dan disogoki oleh kaum imperialis dari luar, yang bercorak dan berkedok apapun juga.

Selama partai-partai buruh di Indonesia penuh diduduki oleh pemimpin-pemimpin sosial-opportunisten dari berbagai jenis, selama partai-partai buruh di Indoensia masih membiarkan anasir-anasir oportunisme berkeliaran di kalangan mereka sendiri, selama kaum revolusioner proletaris tiada bergiat sehabis-habis tenaganya untuk memberi penjelasan yang sebenarnya kepada rakyat pekerja kita, untuk mengisolir pemimpin-pemimpin opportunisten itu dari rakyat kita, dimana-mana dan disegala lapangan hidup, selama P.K.I. khususnya masih dikedalikan oleh orang-orang yang bertanggung-jawab atas pemalsuan Leninisme dalam prakteknya, maka tentulah akan selama itu pula rakyat pekerja Indonesia akan tinggal tetap diombang-ambingkan kekanan dan kekiri guna keperluan kapitalisme-imperialisme dan partai-partai, sekalipun P.K.I. Demikian adanya.

Madiun, April 1947.

